



**UNHAN RI
PRESS**

MENATAP MASA DEPAN

**KERJA SAMA
SIPIL-MILITER INDONESIA**

JILID 1: REFLEKSI HISTORIS

Sjafrie Sjamsuoddin

**MENATAP
MASA DEPAN
KERJA SAMA
SIPIL-MILITER INDONESIA**

JILID 1: REFLEKSI HISTORIS

Sjafrie Sjamsoeddin

Unhan RI Press

2023

MENATAP MASA DEPAN KERJA SAMA SIPIL-MILITER INDONESIA JILID 1: REFLEKSI HISTORIS

Author :

Sjafrie Sjamsoeddin

Editor :

Sovian Aritonang

Herlina Juni Risma Saragih

ISBN Jilid Lengkap : 978-623-8049-30-1

ISBN Jilid 1 : 978-623-8049-31-8

15.5 x 23 cm, vii + 114 pg

Cover & Layout:

Mia Aksara

Penerbit:

CV. Aksara Global Akademia

Anggota IKAPI No: 418/JBA/2021

Kantor:

Intan Regency Block W-13, Tarogong, Garut, Jawa Barat, Kode Pos: 44151

Mobile: 081-2222-3230 – 0895-1961-0629

E-mail: aksaraglobal.info@aksaraglobal.info

Website: aksaraglobal.com – aksaraglobal.co.id

INDONESIA

Cetakan Pertama, @Februari 2023



ISBN 978-623-8049-30-1 (no.jil.lengkap)



ISBN 978-623-8049-31-8 (jil.1)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran.

Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah:

(1 Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(2 Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA SAMBUTAN REKTOR UNHAN RI



Sebagai Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia serta selaku pribadi, saya menyambut gembira dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucapkan selamat kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang telah menulis dan menerbitkan buku dengan judul ***“Menatap Masa Depan Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia, Jilid 1: Refleksi Historis”***, untuk memperkaya literasi buku rujukan bagi yang akan mendalami ilmu pertahanan khusus dalam refleksi kerja sama sipil-militer di Indonesia di masa lalu dan prospeksi nya di masa depan.

Kerja sama sipil-militer di Indonesia lahir dari sebuah realitas sejarah perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari kolonialisme demi membangun kehidupan bernegara yang berdaulat sepenuhnya, adil dan sejahtera.

Dengan adanya buku ***“Menatap Masa Depan Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia Jilid 1: Refleksi Historis”*** ini, diharapkan dapat memberikan sebuah *insight* kepada *stakeholders*, akademisi, maupun masyarakat luas yang mengingatkan kita akan sejarah membangun bangsa atas perjuangan berbagai macam pihak, baik sipil maupun militer yang juga menjadi simbol kekuatan pertahanan dan keamanan yang bahu membahu menghadapi ancaman.

Buku ini berintikan mengenai reflesi dan histori dari Perspektif mengenai peran kerja sama sipil dengan militer guna menghadapi gangguan internal maupun eksternal di era kemerdekaan Republik Indonesia, era reformasi, serta era demokrasi.

Selanjutnya kepada pihak *stakeholder* pengelola pertahanan negara diharapkan dapat menggunakan buku ini sebagai salah satu referensi dalam mengatur pengelolaan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki semua

instansi pemerintah dan lembaga negara sehingga dapat menghasilkan kekuatan pertahanan negara yang optimal.

Kemudian kepada seluruh civitas akademika serta keluarga besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia, saya mengajak untuk memberi apresiasi kehadiran buku ini. Saya juga berharap bahwa buku ini tidak hanya sekedar dibaca tetapi dapat diimplementasikan baik secara pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Lebih dari itu substansi buku ini menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh para akademisi dan praktisi dengan menggunakan pendekatan bidang keilmuan masing-masing, kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan aspek-aspek Tridharma Perguruan Tinggi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua agar tetap menjadi Negara yang aman dan sejahtera. Akhir kata, saya berharap buku "***Menatap Masa Depan Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia Jilid 1: Refleksi Historis***" ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam Bela Negara!.

Jakarta, Februari 2023

Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia,

Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng.
Laksamana Madya TNI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan buku dengan judul: “Menatap Masa Depan Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia Jilid 1: Refleksi Historis” dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan salah satu hasil pemikiran dan perenungan penulis sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dan institusi dimana penulis mengikuti Program Pendidikan tingkat Doktoral untuk bidang Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

Buku ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada yang terhormat Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto., yang saya hormati: Rektor Universitas Pertahanan RI, Laksdya TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., D.E.S.D., ASEAN.Eng., Mayjen TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR., CIPA., Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Dr. Herlina Juni Risma Saragih, M.Si., CIQnR., CIQaR., Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, C.E.S., D.E.A.. Terima kasih ku dengan penuh kasih sayang untuk istri tercinta, anak, menantu dan cucu yang selalu kami banggakan.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat sebagai salah satu sumber referensi bagi para mahasiswa tingkat sarjana (S1), magister (S2), doktoral (S3), akademisi, praktisi, dan peneliti, yang ingin memperdalam penelitian serta pengembangan ilmu pertahanan, dan bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan pertahanan serta masyarakat luas dalam upaya mengembangkan, membangun dan mewujudkan kerja sama sipil-militer, khususnya dalam memperkuat pertahanan negara guna menghadapi berbagai ancaman di Indonesia.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kolonel Kes. Dr. Ir. Sovian Aritonang, S.Si.,M.Si., R. A. Purwoko Putro, Ph.D., Sulistyanto, Ph.D., Dr. Eko G. Samudro S.Pd., M.Han, Wildan Akbar Hashemi R., M.Han, May May Maysarah, M.Han., dan Aniza Kemala, M.Han. Serta para ahli yang telah bersedia penuh untuk menjadi sumber informasi dalam mendukung penyusunan buku ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga TuhanYang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan anugerah dan berkah-Nya. Aamiin YRA.

Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat memperkaya khasanah keilmuan dibidang ilmu pertahanan pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Jakarta, Februari 2023

Sjafrie Sjamsoeddin

SINOPSIS

Apa yang tersirat di benak banyak orang ketika mendengar istilah ‘kerja sama sipil-militer’? Mungkin sebagian besar akan mulai mengernyitkan dahi sambil bertanya-tanya, karena nyatanya, tak sedikit orang yang beranggapan bahwa tentara atau militer bukanlah sosok yang memiliki kedekatan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Padahal sesungguhnya masyarakat sipil sudah menjalankan kerja sama yang erat dengan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak dahulu. Kerja sama sipil-militer telah eksis sejak Rakyat Indonesia berjuang untuk membebaskan diri dan mempertahankan kemerdekaan dari belenggu penjajahan. Perjuangan demi perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut tak lepas dari hasil kerja sama dan upaya di antara tentara dan rakyat atau sipil dengan militer. Kerja sama ini lalu berkembang dari sebuah keyakinan yang merupakan penuntun perjuangan, menjadi sebuah penerapan kehidupan bernegara dalam pembangunan bangsa, tidak ada pembedaan atau dikotomi di antara sipil dan militer. Justru, seluruh elemen TNI dan masyarakat harus bahu-membahu menjaga keutuhan kesatuan NKRI.

Buku ini membahas mengenai kerja sama sipil-militer di Indonesia dari sisi refleksi historis yang dimulai dengan masa perjuangan merebut kemerdekaan, masa pasca perebutan kemerdekaan, lalu masa mempertahankan kemerdekaan hingga akhirnya kita mencapai era reformasi yang menjunjung kerja sama sipil-militer dalam iklim demokrasi. Buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pembaca yang ingin memperluas pemahaman tentang kerja sama sipil-militer, juga merupakan sebuah upaya untuk melihat bagaimana kerja sama sipil-militer diperlukan bagi terwujudnya kekuatan pertahanan guna menopang dan mendukung Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Layaknya semboyan yang diserukan oleh Presiden pertama kita, Soekarno, *“Janganlah sekali-kali meninggalkan sejarah”*. Bagi generasi penerus bangsa, mengetahui dan memahami sejarah berarti juga memiliki dokumen evaluasi yang sangat penting untuk mengembangkan hubungan kerja sama sipil-militer yang lebih baik, baik untuk hari ini, maupun untuk masa depan Indonesia yang dicintai dan dibanggakan ini guna membangun Indonesia unggul.

DAFTAR ISI

URAIAN	HAL
HALAMAN COVER	i
HALAMAN COPYRIGHT	ii
SAMBUTAN REKTOR	iv
KATA PENGANTAR	vi
SINOPSIS	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Pengantar Sipil-Militer Indonesia	2
1.2. Kerja Sama Sipil-Militer untuk Keamanan Nasional di Era Demokrasi	6
1.3. Kerja Sama Sipil-Militer dalam Mengelola Pertahanan Negara	9
BAB II : REFLEKSI HISTORIS KERJA SAMA SIPIL-MILITER INDONESIA	11
2.1. Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia dari masa ke masa	12
2.2. Diplomasi dan Perjuangan Bersenjata	19
2.3. Perang Gerilya sebagai Embrio Kerja Sama Sipil-Militer	30
BAB III : SOEKARNO DAN SOEDIRMAN SEBAGAI TOKOH KERJA SAMA SIPIL-MILITER	39
3.1. Kerja Sama Sipil-Militer Perspektif Soekarno	40
3.2. Kerja Sama Sipil-Militer Perspektif Soedirman	44
3.3. Refleksi Kerja Sama Sipil-Militer dari Dua Sosok Pemimpin Bersejarah	49
BAB IV : PERKEMBANGAN KERJA SAMA SIPIL-MILITER INDONESIA	53
4.1. Kerja Sama Sipil-Militer di Peristiwa DI/TII	54
4.2. Sipil-Militer dalam Jalan Tengah A.H. Nasution	60
4.3. ABRI Masuk Desa sebagai Perwujudan Kerja Sama Sipil-Militer	61
4.4. Kerja Sama Sipil-Militer di Era Reformasi	68
4.5. Pelaksanaan Kerja Sama Sipil-Militer dalam Berbagai Bidang di Era Demokrasi	72

URAIAN	HAL
4.6. Kerja Sama Sipil-Militer dalam Pengembangan Industri Pertahanan	75
BAB V : IMPLEMENTASI SISHANKAMRATA DALAM KERJA SAMA SIPIL-MILITER	83
5.1. Implementasi Sishankamrata	85
5.2. Dari Keyakinan Implementasi Sishankamrata	88
5.3. Model Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia di Masa Depan	89
BAB VI : PENUTUP	101
DAFTAR PUSTAKA	111
TENTANG PENULIS	
TENTANG EDITOR	

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1

Pendahuluan

Di Indonesia, kerja sama sipil-militer bukan hanya suatu keadaan sosial di mana berlangsung interaksi antara militer dan sipil, yang sering kali dijelaskan dengan teori-teori konvensional hubungan sipil-militer, layaknya yang berlaku di masyarakat demokrasi liberal Barat.

Kerja sama sipil-militer di Indonesia lahir dari realitas sejarah perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan demi membangun kehidupan bernegara yang berdaulat sepenuhnya, adil dan sejahtera.

Oleh karena itu, kerja sama di antara tentara dan rakyat tidak bisa sekadar dipahami sebagai sebuah interaksi antara sipil-militer, tetapi juga menjadi sebuah 'bangunan keyakinan' yang mendasari bahwa mempertahankan eksistensi negara Indonesia haruslah menjadi hasil kerja dan usaha tentara-rakyat yang kolaboratif. Dengan kata lain, usaha penyelenggaraan pertahanan adalah sebuah bentuk gotong royong antara sipil-militer.

Sebagai permulaan, bab ini akan membahas latar belakang dari pelaksanaan kerja sama sipil-militer tersebut. Bagaimana interaksi dan kerja sama sipil-militer seharusnya dipandang sebagai usaha penyelenggaraan pertahanan merupakan inti dari bab pembuka ini.

1.1. Pengantar Sipil-Militer Indonesia

Sebagian dari kita mungkin sudah pernah memberikan perhatian khusus pada studi kasus terdahulu yang membahas tentang dinamika dan hubungan sipil-militer Indonesia. Jika kita melihat lebih jauh, studi kasus dan kajian menyangkut kerja sama sipil-militer terdahulu cenderung dilakukan dalam konteks politik. Studi kasus tersebut sering kali memandang dan menekankan kerja sama sipil dan militer sebagai

sebuah bentuk dikotomi, atau pembagian dua kelompok yang bertentangan.

Melalui lensa konvensional relasi sipil-militer, para pengamat perpolitikan Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri, sering kali larut dalam keasyikan untuk melihat korelasi tingkat profesionalisme militer dengan dinamika hubungan sipil-militer, sebut saja misalnya karya-karya klasik seperti Crouch, Sundhaussen dan Salim Said, yang telah menjadi 'buku referensi standar' bagi studi-studi mengenai hubungan sipil-militer berikutnya yang ditulis misalnya oleh Singh, Rinakit serta pengamat-pengamat Indonesia lainnya.

Tentu saja hal ini tidaklah mengejutkan, karena lensa analisis yang digunakan pada umumnya mengambil model relasi sipil-militer yang terjadi di luar Indonesia.

Namun, kita tidak seharusnya terkendala oleh faktor psikologis dan traumatis akibat masa lalu yang memengaruhi dinamika relasi antara sipil dan militer. Sebaliknya, kita harus lebih bijak dalam memandang perlunya integrasi nasional untuk menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan.

Kita tidak boleh lagi mendikotomikan sipil dan militer, dan sebaliknya harus berusaha mencari *resultante* (kemanunggalan) untuk dapat memperoleh kekuatan yang solid bagi pembangunan nasional secara umum serta penguatan pertahanan negara secara khusus.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, kita perlu mengenali dan memahami dengan baik praktik-praktik pengalaman positif kerja sama sipil-militer di masa lampau dan masa kini.

Dari simpul-simpul pengalaman positif itu, nantinya kita dapat menarik sebuah trayektori atau lintasan yang dapat diformulasikan menjadi sebuah paradigma yang lebih merepresentasikan model yang cocok atau tepat bagi kerja sama sipil-militer yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Yang perlu ditekankan, kerja sama antara sipil dan militer Indonesia bukanlah dikotomi atau dua pihak yang bertentangan, melainkan sebuah bentuk kerja sama dari elemen-elemen bangsa, meski perdebatan dan dinamika memang selalu ada di zaman yang

berbeda. Karenanya, tulisan ini bermaksud memandang kerja sama sipil-militer dari konteks yang berbeda dari studi kasus terdahulu.

Usaha ini harus menjadi sebuah urgensi, dan langkah ini bisa kita mulai dengan menatap kembali sejarah kerja sama sipil-militer Indonesia, membandingkan berbagai tinjauan akademis dan praktis, mengetahui lebih banyak tentang relasi kolaboratif sipil-militer yang positif dalam bentuk kerja sama yang produktif bagi penyelenggaraan negara, dan tentunya menatap proses serta tantangan yang akan dilalui ke depannya.

Memang betul, kerap kali kita masih sering mendengar pertanyaan dalam obrolan bebas di ruang publik masyarakat, misalnya bagaimana TNI bersikap jika negara dan bangsa mengalami turbulensi? Bagaimana status legitimasi dan legalitas TNI dalam misi negara tunduk kepada otoritas sipil yang berdaulat untuk lingkup penugasan pada area stabilisasi dan rekonstruksi krisis?

Yang perlu diketahui, TNI bukanlah penentu akhir, melainkan elemen utama negara untuk menyelamatkan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Sebagai militer profesional, TNI diharapkan secara independen menyampaikan pemberitahuan dini kepada negara terhadap berbagai fenomena yang berpotensi menimbulkan destabilisasi kelangsungan hidup dan keselamatan negara.

Persepsi ini dengan sendirinya akan mudah dipahami dan diterima oleh seluruh rakyat, ketika relasi kerja sama sipil-militer juga berlangsung secara sehat dan produktif, yaitu ketika keduanya sama-sama memiliki kesepahaman mengenai bagaimana pertahanan negara harus dilakukan dalam iklim demokrasi.

Kemudian, ada juga alasan lain mengapa penting bagi kita untuk memandang hubungan sipil dan militer di Indonesia sebagai kerja sama dan bukan pertentangan. Hal ini tidak terlepas dari situasi global saat ini, di mana terlihat makin jelas bahwa kepentingan politik dan ekonomi sudah berkembang menjadi sebuah alternatif strategi yang vital dalam mengelola manajemen makro dan bahkan mikro dari suatu negara. Dengan tuntutan untuk bersama-sama melindungi tanah air ini, kedua belah pihak (sipil-militer) dapat bergerak bersama dan bersatu dengan menjauhkan segala perbedaan sudut pandang.

Saat ini, kita memang berada di era demokrasi, di mana faktor dominan yang berpengaruh terhadap transisi terdiri dari tiga hal, yaitu geopolitik, geostrategi, dan geokultural. Namun tampaknya mayoritas masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami ketiga faktor tersebut sehingga dibutuhkan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut terkait hal tersebut.

Di era globalisasi ini, waktu kita hanya akan terbuang apabila kita terus berdebat mengenai dikotomi sipil-militer. Dunia saat ini sedang mengedepankan kerja sama sipil dan militer untuk mendukung supremasi sipil. Dengan kapabilitas dan kredibilitas sipil yang berkembang pesat di berbagai aspek politik, ekonomi dan teknologi, kerja sama sipil-militer saat ini sudah mendunia dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang kemanusiaan dan kenegaraan.

Semua negara yang berpikir secara global tidak akan mempertimbangkan perdebatan mengenai masalah tersebut, karena sipil dan militer sama-sama berkontribusi dalam pembangunan negara. Namun demikian harus diakui bahwa pada awalnya, adanya pemisahan antara sipil dan militer lebih dikarenakan sebagai proses pencarian format ideal, sehingga untuk saat ini sangat tidak tepat membicarakannya lagi.

Ditambah lagi, di tengah zaman yang terus berkembang, generasi milenial dan generasi Z yang merupakan generasi penerus bangsa telah memiliki tata pikir dan intelektual yang mengalami kemajuan yang pesat. Lewat generasi penerus bangsa inilah, diharapkan anggapan mengenai dikotomi yang senantiasa disematkan pada sipil dan militer akan sirna.

Selain menekankan pada pentingnya memandang kerja sama sipil-militer sebagai lebih dari sebuah dikotomi, buku ini juga bermaksud membahas faktor-faktor yang memengaruhi kerja sama sipil-militer dari masa ke masa.

Sesungguhnya, kerja sama sipil-militer Indonesia dalam melindungi negara sejak dahulu hingga saat ini masih merupakan sebuah "*Conditio Sine Qua Non*". Dalam Bahasa Indonesia, istilah latin tersebut dapat diartikan 'suatu kondisi yang tanpanya tidak mungkin'

atau 'tidak bisa tidak' Karena itulah, refleksi sejarah serta perjalanan dari kerja sama sipil-militer Indonesia dari masa ke masa menjadi esensi dari buku ini.

1.2. Kerja Sama Sipil-Militer untuk Keamanan Nasional di Era Demokrasi

Di jalan demokrasi yang dipilih oleh Indonesia dalam mencapai cita-cita nasionalnya, upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:

"... kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ..."

Dari alinea keempat tersebut, kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa:

- 1) Diperlukan suatu situasi dan kondisi yang dapat menjamin terselenggaranya seluruh proses untuk mewujudkan tujuan nasional, cita-cita nasional dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional;
- 2) Membebaskan seluruh warga bangsa ini dari kemiskinan dan kebodohan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa dipayungi oleh jaminan situasi dan kondisi aman yang terjaga dengan baik secara konsepsional;
- 3) NKRI hidup di tengah warga dunia (internasional) yang harus ikut secara aktif mendorong terwujudnya suatu dunia yang damai, serasi, selaras, dan seimbang dalam pergaulan internasional.

Lewat penjabaran tujuan nasional di atas, kita mengetahui bahwa pada dasarnya pembentukan pemerintahan Negara Indonesia adalah

untuk mengelola Keamanan Nasional dan Kesejahteraan Nasional serta turut mewujudkan dunia internasional yang damai dan abadi. Kondisi keamanan nasional menjadi faktor strategis jika diingat dinamika pencapaian kesejahteraan dan kondisi lingkungan strategis sangat tinggi.

Tantangan keamanan nasional saat ini pun menjadi makin kompleks dengan terlibatnya isu-isu yang berkaitan demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pasar bebas menjadi norma dan ukuran dalam pergaulan internasional. Maka dari itu, semua isu keamanan di zaman ini perlu dikelola secara cermat dan terukur agar pembangunan dapat terus berlangsung, sehingga Negara Indonesiapun dapat berjaya, berdaulat, dan terhormat. Ditambah lagi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memicu perubahan pola hidup yang lebih rasional, spesialisik dan individualistik sehingga keadaan ini sangat berpengaruh di dalam proses pembangunan nasional, yang pada gilirannya juga berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.

Dalam menghadapi tantangan terhadap stabilitas keamanan nasional yang seperti itu, setiap sektor negara tanpa terkecuali memang sudah memiliki perangkat kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Namun demikian, terhadap kondisi upaya pembangunan nasional yang dihadapkan dengan makin langkanya sumber daya dan tantangan mendiasporanya energi kolektif bangsa, kelancaran dan kesuksesannya sangat bergantung pada kondisi aman secara nasional yang kondusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional yang dirumuskan dan dijabarkan ke dalam suatu sistem keamanan nasional bersinergi, terpadu, terarah dan konsepsional, dengan landasan historis dan yuridis yang kuat sehingga tidak kehilangan daya operasionalnya.

Landasan historis tersebut tak lain adalah amanat yang tertuang pada pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Alinea ini mengamanatkan pemerintah untuk menyusun suatu aturan perundangan untuk mewujudkan amanat pembukaan tersebut.

Sebagai langkah awal, pemerintah kemudian meresmikan UU No. 6/1946 Tentang Keadaan Bahaya. UU ini kemudian berkembang menjadi UU No. 74/1957 Tentang Pencabutan "*Regelling of de Staat•Van Oorlog Van Beleg*", yang selanjutnya terus menjadi Perpu No. 23/1959 Tentang Keadaan Bahaya dengan turunan PP No 16 tahun 1960 yang esensinya memberi otoritas kepala daerah untuk meminta bantuan militer jika diperlukan.

Pernah timbul pertanyaan pada masa itu, mengapa undang-undang ini terus berkembang? Jawaban faktualnya, pada masa itu pemerintah lebih fokus kepada upaya membangun keamanan dengan kondisi gangguan yang masih kompleks, yaitu gangguan fisik terhadap keamanan dan kedaulatan negara semata. Namun kondisi saat ini yang sangat heterogen dan multi efek, apalagi dalam era demokrasi, tentunya perlu penyesuaian yang mendasar. Penyesuaian ini dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan yang tepat untuk merespons fenomena yang begitu beragam dalam skala nasional, yang juga sesuai dengan era demokrasi.

Era reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi menjadi tonggak historis, yang diikuti dengan lahirnya berbagai aturan perundangan yang mengatur secara teknis penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di tengah bangsa Indonesia, baik yang disebabkan oleh gangguan keamanan fisik, bencana alam, narkoba, wabah penyakit, dan masih banyak lagi yang dapat berpengaruh secara nasional. Karenanya, seluruh elemen bangsa perlu senantiasa mengantisipasi berbagai gangguan yang dapat menggoyahkan keamanan nasional dan bisa datang dari mana saja secara simultan atau pada waktu yang sama.

Antisipasi tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui kerja sama sipil-militer, yang melibatkan berbagai elemen bangsa. penerapan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sishankamrata memiliki tiga pilar utama yang terdiri dari Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. Sementara itu Ruang, Alat, dan Kondisi Kejuangan (RAK Juang) menjadi koridor atau pijakan dasar bagi model kerja sama sipil-militer Indonesia.

1.3. Kerja Sama Sipil-Militer dalam Mengelola Pertahanan Negara

Dari pengamatan akan dinamika dan perubahan yang ada, di tengah negara dan bangsa yang sudah *open minded* terhadap militer dengan *Trend Military Millennium* masa kini dan mendatang, ada baiknya negara mempertimbangkan perubahan pada pola kerja sama sipil-militer dengan mendayagunakan kapasitas individu TNI untuk memperkuat pemerintahan sipil. Maka itulah, pembangunan kekuatan TNI pun perlu disesuaikan dengan dinamika masa kini dan mendatang.

Secara konkret, wujud kerja-sama sipil militer dapat dilakukan dengan memperkuat pemerintahan sipil melalui interaksi di dalam lembaga-lembaga yang terkait dengan keamanan nasional, contohnya seperti Dewan Energi Nasional dan Badan Perbatasan.

Dengan mengombinasikan keahlian sipil serta *expertise* militer, nantinya akan muncul sebuah perspektif yang solid dalam menyusun suatu kebijakan negara yang komprehensif. Inilah wujud dari kerja sama sipil-militer di era demokrasi, yang cikal bakalnya sudah terbentuk sejak zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan perkembangannya akan kita bahas dalam bab-bab selanjutnya.

Berangkat dari sebuah keyakinan yang berkembang menjadi sebuah penerapan, kerja sama sipil-militer dalam wujud Sishankamrata merupakan jalan bagi Indonesia untuk mengelola pertahanan di era demokrasi dan globalisasi. Dan untuk memperdalam keyakinan tersebut, kita bisa memulainya melalui refleksi historis kerja sama sipil-militer Indonesia di masa lalu.

BAB II

**REFLEKSI HISTORIS KERJA
SAMA SIPIL-MILITER
INDONESIA**

Bab 2

Refleksi Historis Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia

Sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa punya kaitan erat dengan perjuangannya dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pastinya kita mengetahui, proses untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Kemerdekaan adalah sebuah pencapaian yang diraih setelah para pejuang bangsa kita melalui proses yang begitu panjang.

Salah satu ciri khas yang tersemat pada perjuangan militer, bahkan sejak era perlawanan bersenjata merebut kemerdekaan, adalah kerja samanya dengan rakyat atau sipil. Di tengah perjuangan yang berisiko tinggi tersebut, kerja sama pejuang militer dengan para pejuang serta rakyat sipil punya peranan yang begitu besar. Sipil dan militer memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam proses meraih dan mempertahankan kemerdekaan NKRI.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kedua belah pihak terkadang memiliki perbedaan pandangan. Meskipun begitu, pada akhirnya sipil dan militer tetap dapat bahu membahu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang satu, yaitu kemerdekaan Indonesia.

Bagaimana kerja sama sipil dan militer berlangsung pada masa perjuangan kemerdekaan hingga perlawanan bersenjata merebut kemerdekaan meski dengan segala tantangan yang melanda? Bab ini secara khusus akan membahas kerja sama sipil-militer Indonesia di zaman tersebut.

2.1 Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia dari Masa ke Masa

Cikal bakal dari kerja sama sipil-militer Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak zaman perjuangan kemerdekaan, tepatnya pada masa

pendudukan Jepang. Asal mula dari kerja sama sipil-militer Indonesia ini terkait erat dengan pembentukan angkatan bersenjata Indonesia.

Pada dasarnya, tentara sendiri juga berasal dari rakyat. Maka itu, keberadaan tentara tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan rakyat. Militer Indonesia ada karena rakyat ada. Hal tersebut pun sudah terlihat bahkan sejak zaman pendudukan Jepang.

Jauh sebelum Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbentuk, perjuangan Indonesia bisa terlaksana berkat rakyat yang tergabung ke dalam berbagai kelompok bersenjata, misalnya laskar-laskar perjuangan dan tentara rakyat. Berbagai kelompok bersenjata yang didirikan pada masa pendudukan Jepang menjadi cikal bakal dari pembentukan militer Indonesia, yang sekarang ini kita kenal sebagai TNI.

Pada masa itu, para pemuda Indonesia menjadi pihak yang memiliki peranan yang signifikan. Tak sedikit dari mereka yang turut berkontribusi dalam kelompok bersenjata yang didirikan Jepang, seperti Pembela Tanah Air (PETA), Front Phong, Seinendan, Keibodan dan Heiho.

Ketika sebagian memilih untuk berpartisipasi dalam kelompok bersenjata, ada juga sebagian lain yang memutuskan untuk menjadi bagian dari gerakan politik seperti Masyumi, Putera, dan Jawa Hokokai.

Meski berada di dua jalan yang berbeda, yaitu jalan politik dan jalan militer, seluruh pejuang—termasuk para tokoh-tokoh nasional—yang memilih untuk bergabung ke organisasi-organisasi propaganda Jepang tersebut mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu meraih kemerdekaan Indonesia.

Lalu, bagaimana angkatan bersenjata Indonesia resmi terbentuk setelah negara ini meraih kemerdekaannya? Ada proses yang cukup panjang di balik semua itu, dan para politisi sipil turut terlibat di dalamnya.

Saat Jepang menyatakan kekalahan atas sekutu akibat peristiwa pemboman Hiroshima-Nagasaki, Indonesia tak membuang waktu untuk memproklamasikan kemerdekaannya dengan segera. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, mereka juga turut meninggalkan

beberapa kelompok paramiliter bersenjata, yang pimpinan dan anggotanya ditempati oleh rakyat dan pemuda Indonesia.

Terdapatnya sisa-sisa dari kelompok paramiliter tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang dapat diperhitungkan untuk membentuk angkatan bersenjata sendiri.

Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi militer di Indonesia, yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. BKR didirikan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BKKPR) dengan anggota yang terdiri dari mantan anggota PETA, Heiho, dan Seinendan serta barisan pemuda lainnya.

Bersandingan dengan BKR yang memiliki tugas menjaga terjaminnya keamanan dan ketertiban umum, dibentuk pula Komite Nasional Indonesia (KNI) yang bertugas membantu Presiden, serta Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bertugas mempertahankan kemerdekaan dan bergerak dalam bidang politik, sekaligus berperan sebagai motor revolusi. (Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1982)

Meski disebut sebagai cikal bakal dari angkatan bersenjata Indonesia, pembentukan BKR sebagai organisasi militer saat itu dianggap belum cukup untuk menjadi organisasi militer yang kokoh dan kuat, karena BKR didirikan atas dasar demokrasi dan tidak dibentuk semata sebagai kekuatan militer.

Terlebih lagi, keterlambatan pembentukan organisasi militer juga mendorong rakyat, khususnya para pemuda, untuk membentuk badan-badan perjuangan tersendiri yang tersebar di berbagai daerah.

Dalam tulisan berjudul *Badan-Badan Perjuangan* (Departemen Pertahanan-Kemampuan Pusat Sejarah ABRI, 1983), disebutkan bahwa badan perjuangan tersebut terdiri dari bermacam-macam organisasi pemuda yang muncul secara spontan sejak bulan Agustus 1945 dan selama perang kemerdekaan Indonesia (1945-1949). Badan perjuangan ini bahkan sudah terbentuk sebelum partai-partai politik, organisasi massa, dan organisasi ketentaraan resmi didirikan.

Anggota dari badan-badan perjuangan ini pada dasarnya bergabung dan bergerak secara sukarela. Meski begitu, mereka memiliki suatu bagian atau seksi yang dipersenjatai. Bagian-bagian yang dipersenjatai inilah yang biasa disebut sebagai laskar. Selain bergerak di jalur senjata, terdapat juga sebagian dari mereka yang memutuskan untuk menjadi bagian dari gerakan politik dan pemerintahan (Departemen Pertahanan-Kemampuan Pusat Sejarah ABRI, 1983).



Gambar 2.1: Dengan bersenjatakan bambu runcing, para pemuda di Jakarta menunjukkan tekad kuat untuk mempertahankan proklamasi dengan semboyan “Merdeka atau Mati untuk Tanah Air Tercinta”

Sumber: Ipphos dalam 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: Masa Perang Kemerdekaan, Konsolidasi Awal, dan Masa Integrasi (1945-1965)

Pembentukan laskar-laskar ini tidak terkontrol secara pusat dan umumnya dipengaruhi oleh ideologi kepartaian dan politik aliran. Sebagian besar dari mereka adalah mantan prajurit PETA, Heiho, dan Keibodan yang memiliki jiwa perjuangan dan latar belakang yang berbeda-beda dalam perjuangannya, sehingga mereka menolak untuk bergabung dengan BKR (Kivlan Zen, 2021)

Seiring berjalannya waktu, angkatan bersenjata Indonesia belum menunjukkan kemajuan menuju terbentuknya organisasi militer yang lebih solid dan profesional yang sesuai dengan semangat persatuan Indonesia. Di saat yang bersamaan, perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya juga belum usai. Upaya untuk memperoleh pengakuan atas kedaulatan tanah air masih menjadi pekerjaan rumah untuk para pejabat sipil serta pejuang militer.

Situasi pun diperkeruh oleh Belanda yang mulai melancarkan niatnya untuk merebut kembali bumi nusantara. Ancaman tersebut membuat kalangan militer terus mendesak pemerintah untuk segera membentuk angkatan bersenjata yang dapat menjaga keamanan negara dari ancaman Tentara Belanda dan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) juga Tentara Sekutu.

Ketika berlangsung perebutan senjata dari tangan Jepang dan pertempuran mulai melanda di seluruh pelosok tanah air, Pemerintah RI memanggil Oerip Sumoharjo, yang merupakan pensiunan mayor KNIL (*Koninklijke Nederlands Indisch Leger*), seorang tokoh yang juga terkenal dengan ucapan '*Wong negara kok zonder tentara?*' (Kok Negara tanpa tentara?). Tokoh perjuangan ini pun pernah berkata bahwa sipil tidak mungkin tidak bisa tanpa tentara dan tentara pun lahir dari rakyat.¹

Oerip kemudian diangkat sebagai Kepala Staf Umum dan ditugaskan untuk menyusun pembentukan angkatan bersenjata republik Indonesia. Dari situlah, Pemerintah RI pada tanggal 5 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat yang berisi keputusan mengenai perubahan BKR menjadi TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. TKR memiliki tanggung jawab kepada negara di laut, darat, dan udara dengan markas tertinggi yang berpusat di Yogyakarta (Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1976).

Dalam maklumat tersebut, diserukan panggilan bagi para pemuda dan rakyat—termasuk mereka yang memiliki latar belakang sebagai prajurit PETA prajurit Hindia Belanda dan Heiho, para anggota Barisan

¹ Hasil wawancara dengan tim Pusjarah TNI

Pemuda, dan tak ketinggalan mereka yang belum pernah memperoleh pelatihan militer, untuk selekas-lekasnya mendaftarkan diri ke kantor BKR.

Pada tanggal 18 Desember 1945, Soedirman ditetapkan sebagai Panglima besar TKR dengan pangkat Jenderal. Pembentukan TKR ini pun tak terlepas dari keinginan pemerintah untuk mewujudkan keamanan bagi rakyat. Presiden Soekarno dalam maklumatnya menyebut bahwa untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat.

Pembentukan TKR pun mendapat sambutan yang sangat besar dari masyarakat, baik mereka yang sudah menjadi anggota BKR sebelumnya, maupun mereka yang berasal dari badan-badan perjuangan bersenjata lain. Bahkan, pemuda-pemuda yang sebelumnya bukan merupakan anggota organisasi badan perjuangan juga menunjukkan antusiasme terhadap pembentukan TKR. Lalu, terdapat juga usulan agar nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Perubahan nama ini dimaksudkan untuk memperluas tanggung jawab TKR di bidang pertahanan. Usulan tersebut disetujui pada tanggal 1 Januari 1946, namun belum selang sebulan berlalu, kembali terjadi perubahan nama bagi organisasi militer Indonesia.

Kali ini, militer Indonesia diubah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia. Perubahan nama ini dianggap sebagai sebuah penyempurnaan yang juga bertujuan untuk menciptakan kerja sama dengan badan-badan perjuangan bersenjata lainnya yang masih menolak untuk bergabung sejak pembentukan BKR dan memiliki laskar tersendiri.

Perubahan nama organisasi militer ke TRI tak hanya memberi dampak yang cukup signifikan pada perkembangan angkatan bersenjata Indonesia, namun juga membuka ruang kerja sama yang lebih besar di antara pihak militer dan sipil.

Pada bulan Maret 1946, Pemerintah membentuk Panitia Besar Reorganisasi Tenggara yang beranggotakan para politisi sipil. Tugas dari panitia ini adalah merumuskan saran tentang pembentukan Kementerian Pertahanan, bentuk tentara, organisasi tentara, dan lain-

lain. Hasil dari saran tersebut diumumkan pada bulan Mei 1946. Para pejabat teras TRI seperti Panglima Besar, Kepala Staf Umum dan Panglima Divisi pun dilantik pada bulan yang sama.

Setahun kemudian, diadakan juga rapat antara pimpinan TRI dengan pimpinan laskar-laskar dari berbagai daerah. Rapat itu membuahkan hasil di mana para pimpinan laskar bersedia mengadakan koordinasi longgar dengan TRI, tetapi menolak adanya garis komando.

Organisasi militer Indonesia pun perlahan mulai terbentuk dengan kokoh, namun belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang siap melanda. Dengan situasi keamanan dalam negeri yang makin terdesak, tekanan dari kelompok militer pun terus diajukan terhadap Presiden Soekarno untuk kembali memperkuat organisasi militer tanah air.

Segala usaha tersebut membuahkan hasil. Berdasarkan hasil kerja Panitia Pembentukan Organisasi Nasional Tentara Nasional Indonesia, pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan dekrit pembentukan komisi pengorganisasian Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 5 Mei 1947 yang isinya Republik Indonesia menyetujui pergantian TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kali ini, laskar-laskar perjuangan pun setuju untuk bergabung dan berjuang bersama TNI. Namun sebelum keputusan itu sempat terlaksana sepenuhnya, Belanda sudah terlanjut melancarkan agresi militernya (Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1985).

Tetap saja perubahan nama ini jadi sebuah langkah yang krusial bagi perjuangan bangsa, terutama dengan bergabungnya seluruh kekuatan bersenjata dari berbagai wilayah ke dalam tubuh TNI. Penggabungan berbagai kekuatan ini otomatis menjadikan TNI sebuah angkatan bersenjata nasional, dengan kekuatan yang lebih besar daripada nama-nama yang diberikan sebelumnya. Tak hanya menggabungkan para anggota organisasi militer dengan badan-badan perjuangan yang sebelumnya menolak untuk bekerja sama,

pembentukan TNI punya arti khusus dan menjadi sebuah simbolisasi dalam memperkuat kerja sama sipil-militer.

Lewat pembentukan TNI, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dengan menjalankan usaha Perjuangan Rakyat Semesta secara menyeluruh di wilayah Indonesia, yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang terdiri dari sipil dan militer, dapat terlaksana.

Pembentukan TNI yang memungkinkan pelaksanaan Pertahanan Rakyat Semesta, di mana setiap unsur dalam masyarakat memiliki posisi dan peranan yang penting untuk berpartisipasi dalam perang kemerdekaan, telah menjadi awal dari pelaksanaan kerja sama sipil-militer pada masa itu

Dalam pelaksanaan perjuangan rakyat semesta ini, unsur-unsur seperti organisasi kepemudaan yang bersenjata turut mengambil bagian dalam perjuangan. Lewat perjuangan inilah, seluruh elemen rakyat melebur dalam derap langkah yang sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. (Departemen Pertahanan-Kemampuan Pusat Sejarah ABRI, 1983)

Dari sini, kita melihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan militer Indonesia memiliki sebuah keunikan. Militer Indonesia dapat tumbuh dan berkembang berkat keinginan dari rakyat yang berjuang untuk kemerdekaan. Militer Indonesia juga terbentuk secara spontan, yang meski awalnya terpisah-pisah dengan banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan, pada akhirnya dapat bersatu demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1982).

2.2 Diplomasi dan Perjuangan Bersenjata

Setelah Indonesia resmi memiliki angkatan bersenjatanya, kerja sama sipil-militer turut bertumbuh dan banyak berperan dalam berbagai penetapan keputusan penting serta pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.



Gambar 2.2: Wakil Presiden Moh. Hatta bersalaman dengan seorang anggota tentara hijrah di Stasiun Kereta Api Yogyakarta, Januari 1948.

Sumber: Ipphos dalam 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: Masa Perang Kemerdekaan, Konsolidasi Awal, dan Masa Integrasi (1945-1965)

Kerja sama sipil-militer ini salah satunya tercermin dalam pertempuran yang tersebar di berbagai daerah. Saat pertempuran berlangsung, para politisi sipil pun mengusahakan perundingan dengan pimpinan pasukan Jepang di Jakarta. Proses itu kemudian berlanjut ketika pasukan sekutu mendarat di Semarang pada 19 Oktober 1945.

Misalnya di Malang, para pemuda sukses merebut pangkalan udara Bugis dan menguasai sejumlah pesawat terbang. Di Surabaya, para pemuda juga melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan tentara Jepang dan merebut Gedung Kempetai pada 1 Oktober 1945 (Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1985)

Lewat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya angkatan bersenjata yang terdiri dari TKR serta badan-badan perjuangan lain bukan jadi satu-satunya pihak yang melancarkan perjuangan.

Dalam tulisan yang berjudul Pertempuran Surabaya (Notosusanto, 1968), disebutkan bahwa tekad untuk mengusir pasukan sekutu dari tanah Surabaya juga ditunjukkan oleh para wanita,

ibu rumah tangga, serta para pemuda-pemudi yang tidak langsung terjun ke medan pertempuran. Dalam hal tersebut, rakyat ikut menyiapkan logistik untuk para pejuang serta pengadaan makanan dan minuman.

Bersama-sama dengan masyarakat Surabaya, Pemerintah Daerah yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Soerjo pun dengan tegas menolak ultimatum yang dilontarkan Inggris untuk menghentikan perlawanan dan menyerah tanpa syarat. Lewat pidato yang dikumandangkannya pada tanggal 9 November 1945, Gubernur Soerjo menguatkan tekad para pejuang untuk terus melawan keganasan sekutu.

Lalu pada peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tahun 1946, angkatan bersenjata (saat itu TRI) tidak menjadi satu-satunya pihak yang menjalankan upaya untuk melawan sekutu dan NICA lewat operasi bumi hangus. Atas kesadaran sendiri, masyarakat ikut membumihanguskan logistik dan rumah-rumah di wilayah mereka, dengan tujuan agar tidak dikuasai oleh belanda.

Meski di tengah situasi konflik, kerja sama sipil-militer Indonesia juga berhasil dilaksanakan dalam tingkatan internasional, tepatnya melalui tugas pemulangan tentara Jepang, yang datang dari permintaan Tentara Sekutu kepada TKR untuk memulangkan *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) yang saat itu masih berada di wilayah Indonesia seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2004).

Indonesia dan sekutu kemudian menyepakati perjanjian untuk pemulangan tentara Jepang dan evakuasi APWI, di mana tugas tersebut diserahkan oleh pemerintah republik kepada TRI. Dari situlah, didirikan Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang dan APWI (POPDA). Sebagai sebuah organisasi, POPDA memiliki anggota yang terdiri dari TRI, Kepolisian, Jawatan Kereta Api, Jawatan Kesehatan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) (Saleh, 1987).



Gambar 2.3: Jenderal Soedirman mengawasi pelaksanaan tugas kemanusiaan lewat pengawalan terhadap APWI dan pemulangan tawanan Jepang oleh pasukan TRI di Malang, 28 April 1946.

Sumber: Ipphos dalam 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pada akhirnya, pelaksanaan tugas ini dapat berjalan lancar berkat kerja sama sipil-militer. Kerja sama ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan satu kekuatan atau satu pihak, yaitu militer saja atau sipil saja, namun dua pihak yang berjalan bersama dan menghasilkan keseimbangan.

Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kerja sama sipil-militer pun turut tertuang lewat pelibatan pelajar serta keberadaan lembaga-lembaga pendidikan perwira. Misalnya Akademi militer Tangerang yang terbentuk pada tanggal 18 November 1945, Militer Akademi Yogyakarta yang didirikan awal tahun 1946, juga sekolah-sekolah militer di Sumatra seperti Sekolah Kadet di Bratsagi, Sekolah Opsir Divisi IX di Bukittingi. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda, kegiatan pendidikan terpaksa terhenti dan para taruna pun turun ke medan perang untuk bergerilya. Bahkan, tak sedikit mereka yang gugur selama bergerilya (Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1985).



Gambar 2.4: Sebagian Taruna Militer Akademi Yogyakarta, di daerah gerilya Sub Wehrkreise III, Tahun 1949

Sumber: Ipphos dalam 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: Masa Perang Kemerdekaan, Konsolidasi Awal, dan Masa Integrasi (1945-1965)

Peristiwa-peristiwa di atas adalah beberapa dari sekian contoh kerja-sama sipil-militer dalam memperjuangkan kemerdekaan di masa revolusi. Satu hal yang perlu dicatat, militer pun juga memiliki peranan dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan sipil di tengah perjuangan tersebut. Di sela-sela tugas operasi semacam ini, para pejuang militer juga memberikan bantuan bagi rakyat dan menjalankan aksi kemanusiaan dengan menjadi guru di daerah-daerah terpencil serta memberikan bantuan kesehatan.

Pada perkembangan selanjutnya, terdapat dua jalur yang diambil oleh para pejuang bangsa dalam menghadapi upaya-upaya serangan Belanda yang mengancam kedaulatan Indonesia. Yang pertama adalah jalur diplomasi, yang diupayakan oleh para politisi sipil. Yang kedua

adalah perjuangan bersenjata dengan taktik gerilya, yang diinisiasikan oleh pasukan militer Indonesia.

Saat itu, pihak sipil memutuskan untuk fokus pada jalur politik lewat upaya diplomasi dengan Pemerintah Belanda. Alasan penggunaan jalur ini tak lain untuk mempertahankan kemerdekaan sambil mencegah jatuhnya lebih banyak korban akibat persetujuan bersenjata.

Di saat yang bersamaan, politisi sipil senantiasa mempertahankan keberadaan TNI sebagai angkatan bersenjata Indonesia meski pihak Belanda kerap melayangkan tuntutan untuk membubarkan TNI sepanjang tahun 1948.

Hal ini dikisahkan oleh Himawan Soetanto dalam bukunya yang berjudul 'Yogyakarta: Jenderal Spoor (Operatie Kraai) versus Jenderal Soedirman' (Perintah Siasat No.1)'. Hal ini bermula ketika Belanda dan Indonesia melakukan perundingan tentang pelaksanaan perjanjian Renville. Saat itu, Belanda secara lantang menyuarakan rencana pembubaran TNI serta penghentian hubungan luar negeri Republik Indonesia (Soetanto, 2006).

Pimpinan angkatan bersenjata Belanda, Jenderal Spoor dengan gigih menuntut penarikan serta likuidasi Angkatan perang RI secara total dan mendorong pembentukan Tentara Federal, hingga bayangan kemerdekaan RI tak tersisa sekecil pun. Meski dengan kemauan Jenderal Spoor yang begitu kuat untuk melenyapkan TNI, tekad Jenderal Soedirman sebagai pemimpin TNI pun tak kalah kokoh. Dalam sebuah surat yang dilayangkan kepada Bung Hatta, Jenderal Soedirman menegaskan bahwa TNI menolak pembentukan tentara federal di bawah komando Belanda dan menolak keterlibatan Belanda dalam pertahanan Indonesia. Jika tentara federal memang akan dibentuk, TNI-lah yang harus menjadi tulang punggungnya dengan komando tertinggi di tangan perwira Indonesia.

Bagi Jenderal Soedirman dan para pejuang, TNI adalah tentara Indonesia yang merdeka, dan dalam keadaan apapun, TNI akan terus melanjutkan perjuangan mereka hingga kemerdekaan tercapai secara penuh, tanpa pernah bersedia berkompromi dengan Belanda.

Pada tanggal 17 Agustus 1948, Kabinet Republik Indonesia memutuskan bahwa TNI lah yang akan menjadi inti Tentara Federal Indonesia Serikat apabila angkatan bersenjata tersebut memang akan dibentuk. Kemudian, dibentuk pula sebuah badan musyawarah bernama Dewan Siasat Militer, di mana pimpinan tertinggi dari politisi dan militer bersama-sama duduk sebagai anggota. Lewat pembentukan Dewan Siasat Militer, suara TNI didengar pada tingkat politik tertinggi. Tanpa kerja sama dari pihak TNI, maka pengambilan keputusan politik mengenai masa depan Indonesia tidak dapat dilakukan.

Sejak saat itu, para politisi sipil tak henti-hentinya menegaskan bahwa tuntutan Belanda untuk membubarkan TNI adalah hal yang mutlak tidak dapat diterima. Sedikit pun tidak terlintas di benak Pemerintah Republik Indonesia untuk membubarkan TNI.

Meskipun hal ini menyebabkan kebuntuan dalam usaha perundingan dengan Belanda dan membuat perang terbuka tak dapat lagi dihindarkan, upaya para politisi sipil untuk terus mempertahankan keberadaan TNI menjadi bukti nyata dari kerja sama sipil-militer di masa lalu.

Untuk melengkapi perjuangan yang dijalankan para politisi sipil, para pemimpin militer pun tidak pantang menyerah dalam melaksanakan perjuangannya. Lewat perang rakyat yang lama, sikap nonkooperasi dan aksi bumi hangus, para pejuang militer mendukung upaya diplomasi yang dilaksanakan para politisi sipil untuk mencapai hasil yang memuaskan atau sampai musuh kehabisan tenaga dan kehilangan kemauan untuk perang hingga mereka bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan Indonesia (Soetanto, 2006).

Lewat dua jalur perjuangan inilah, keberadaan militer dan sipil dapat saling melengkapi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, meski dengan segala keterbatasan yang ada serta tantangan yang dihadirkan oleh Belanda.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan kedua belah pihak beberapa kali diwarnai dengan berbagai pasang surut dan dinamika. Namun demi mencapai tujuan yang satu, para pemimpin militer tetap menyatu dan bahu membahu bersama pemimpin sipil sambil menjalankan perjuangan di dua jalur yang berbeda.

Contohnya dapat dilihat kembali ketika Belanda mengingkari kesepakatan dari Perjanjian Renville. Pihak Belanda kemudian melancarkan Agresi Militer Belanda II dengan menyerang Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara. Situasi berubah makin mencekam saat Belanda menawan Soekarno, Hatta, dan Sjahrir yang merupakan tulang punggung dari pejuang sipil.

Lewat agresi militer ini, Belanda menyatakan kepada dunia luar lewat siaran radio, bahwa Republik Indonesia sudah berakhir pada tanggal 18 Desember 1948. Mendengar berita tersebut, Sjafruddin Prawiranegara bersama Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, Kolonel Hidayat, mengunjungi Mr. Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera sekaligus Ketua Komisaris Pemerintah Pusat untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 19 Desember 1948 di kediaman yang bersangkutan.

Pertemuan itu sendiri dapat dimaknai sebagai kerja sama sipil-militer masa perjuangan. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa perlu dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sebagai pemerintahan sementara dan sekaligus menunjuk Sjafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI.

Pembentukan PDRI sebagai pemerintahan darurat sementara dilakukan karena Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta ditawan oleh Belanda. Pembentukan PDRI adalah sebuah bentuk pernyataan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih berdiri meskipun para pemimpin negaranya ditawan oleh Belanda.

Penunjukan Sjafruddin Prawiranegara untuk memimpin PDRI pun dilakukan atas dasar kesepakatan antara Pemerintah dan pimpinan TNI. Saat itu, kedua belah pihak menyetujui bahwa apabila Belanda menyerang, maka Pemerintahan akan menyingkir ke luar kota, dan akan dilaksanakan pula perang gerilya.

Maka itu, saat Belanda menduduki Yogyakarta dan menawan para pemimpin negara, tidak terjadi kepanikan. Terlebih lagi, angkatan perang dengan sihap membagi wilayah pertahanan republik menjadi dua komando, yaitu Jawa dan Sumatera, sehingga para tokoh pejuang sipil dan militer siap melaksanakan rencana di bidang pemerintahan tersebut.



Gambar 2.5: Jenderal Soedirman bersama Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara bertemu di Yogyakarta, 10 Juli 1949

Sumber: Ipphos dalam 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sesuai Perintah kilat Panglima Besar Soedirman, dilaksanakan pula perang gerilya di masa ini. Berdasarkan rencana yang telah

disepakati sebelumnya dan disetujui oleh Pemerintah, seluruh kekuatan TNI yang masih ada di Yogyakarta diperintahkan ke luar kota untuk bergerilya.

Sebagai kelanjutan dari perjuangan dan kerja sama antara sipil dan militer, TNI dengan segera melancarkan strategi perang Gerilya di Jawa. Kuatnya kerja sama sipil-militer pada masa ini sangat terasa dalam usaha memukul mundur Belanda dari Yogyakarta.

Dalam perang gerilya melawan pasukan Belanda, PDRI turut berperan sebagai suatu pos komando yang menghubungkan perjuangan bersenjata TNI dan rakyat yang dipimpin Jenderal Soedirman di Jawa dan Sumatra, dengan perjuangan diplomasi oleh para politisi sipil yang terlaksana di luar negeri (Kartasmita *et al.*, 1995)

Keberadaan PDRI di Bukittinggi menjadi perwujudan kerja sama sipil-militer untuk menjaga kelangsungan perjuangan politik melalui diplomasi dan maupun perjuangan bersenjata yang telah dilakukan selama ini.²

Begitu Belanda akhirnya menarik pasukannya dari Yogyakarta pada tanggal 24-30 Juni 1949, pihak sipil dan militer bersama-sama merayakan keberhasilan tersebut. Ketika para gerilyawan yang dipimpin oleh Panglima Besar Soedirman memasuki Kota Yogyakarta, para penduduk menyambut mereka dengan lambaian tangan dan teriakan 'Merdeka' yang lantang. Lewat parade militer di alun-alun Jogja, rakyat berjejal-jejal menyambut pasukan Jenderal Soedirman di sepanjang jalan (Pusat Sejarah TNI, 2004)

Saat itu, rakyat yang selama enam bulan hidup dalam ketakutan akhirnya bebas dari cengkraman Belanda, sementara para tentara

² Contohnya, TNI lewat Angkatan Udara punya peranan penting dalam membantu, mendukung, dan menyiapkan fasilitas guna lancarnya pemerintahan darurat yang didirikan di Sumatera Barat. Sub Dinas Sejarah Angkatan Udara Indonesia, *Peran TNI-AU pada masa pemerintah darurat Republik Indonesia tahun 1948-1949*, Jakarta: Subdisjarah, 2001, hal. 31

gerilyawan yang telah berjuang dalam waktu yang lama akhirnya juga bisa bernapas lega.



Gambar 2.6: Setelah tercapai persetujuan tentang pengembalian Yogyakarta ke tangan RI, TNI mulai memasuki Yogyakarta pada 29 Juni 1949.

Sumber: Ipphos dalam 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Tindakan Belanda yang kembali mengingkari perjanjian berujung menimbulkan kecaman dari dunia internasional, yang menuding bahwa Belanda telah melakukan agresi terhadap sebuah negara yang berdaulat dan melanggar prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Tim Redaksi Majalah WIRA, 2015).

Perjuangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada akhirnya mencapai tujuannya. Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya dan diakui oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

Kesatuan upaya kerja sama sipil dan militer pada masa perjuangan merupakan bukti nyata bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah hasil perjuangan bersama antara sipil dan militer dengan satu semangat yang sama. Pengalaman penting masa perjuangan ini lalu menjadi keyakinan bagi masa-masa selanjutnya dalam mengisi kemerdekaan.

2.3 Perang Gerilya sebagai Embrio Kerja Sama Sipil-Militer

Sebelumnya, telah dibahas upaya kolaboratif yang dilakukan sipil dan militer dalam mempertahankan kemerdekaan tanah air. Kerja sama ini dilaksanakan lewat perang gerilya, yang menjadi sebuah kekuatan perjuangan yang sangat besar dan efektif dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa-masa selanjutnya hingga kini, semangat persatuan di antara sipil dan militer juga menjadi pilar penting pembangunan mengisi kemerdekaan.

Pertanyaan menarik yang kemudian dapat diajukan adalah: bagaimana perang gerilya tersebut dapat menjadi semacam paradigma atau model yang unik bagi kerja sama sipil-militer dalam konteks Indonesia?

Perang gerilya yang dalam bahasa Inggris disebut *guerilla warfare* memiliki arti harfiah perang kecil. Ini adalah sebuah taktik perang yang punya kaitan erat dengan peranan rakyat. Tjokropranolo & Arifin (1992) menyebutkan bahwa prinsip dasar dari perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Soedirman adalah memanfaatkan desa, hutan, dan gunung sebagai tempat untuk berlindung dan mengorganisasi penyerangan terhadap musuh.

Kolonel Abdul Haris Nasution, yang memiliki pengalaman menghadapi Agresi Militer Belanda I, memberikan arahan dalam pelaksanaan perang gerilya pada masa revolusi. Ia mengatakan bahwa penyerbuan Belanda tidak mungkin dapat ditahan, namun setidaknya dapat diperlambat dengan gangguan serta bumi hangus, guna memperoleh ruang dan waktu sebanyak-banyaknya untuk mengungsikan pasukan, alat-alat, pegawai, dan rakyat ke kantong-kantong pedalaman. Ia juga menekankan bahwa pokok perlawanan adalah perang gerilya, yang di satu pihak bersifat agresif terhadap lawan, dan di lain pihak dapat menegakkan *de facto* RI, dalam artian militer dan sipil ditempatkan di kantong-kantong sebanyak mungkin.

Gagasan pertahanan dan perjuangan rakyat semesta lewat perang gerilya ini harus terus diperjuangkan meski dengan berbagai tantangan yang ada. Dalam perang gerilya, salah satu tahapan pentingnya adalah perencanaan perlawanan rakyat yang bersifat regional atau kedaerahan. Tugas ini pada dasarnya diwujudkan dalam

penjagaan keamanan desa, yang tidak kalah penting dari sudut kepentingan politik dan logistik. Apabila semuanya dapat berjalan baik, maka dapat dipastikan pasukan Belanda tidak akan pernah merasa aman (Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1985).

Perintah Siasat No. 1 yang dikeluarkan oleh Jenderal Soedirman pada tanggal 1 Mei 1948 merupakan pedoman dasar bagi para pejuang militer dalam melaksanakan strategi perang gerilya di era revolusi. Berdasarkan perintah tersebut, TNI berhasil menghadapi tentara Belanda dan menguasai keadaan dengan bersatu bersama rakyat (Kartasmita *et al.*, 1995).

Sebagai kelanjutan dari Perintah Siasat No. 1, Panglima Besar Soedirman juga mengeluarkan instruksi pada tanggal 9 November 1948. Dalam instruksi tersebut, beliau mengatur tugas-tugas untuk tiap daerah dan pasukan, di mana terdapat penugasan untuk aksi "*Wingate*" dan pembentukan "*Wehrkreise*". Tak ketinggalan, dalam instruksi tersebut, terdapat juga petunjuk pelaksanaan tugas pertahanan rakyat dan perang gerilya dalam arti yang seluas-luasnya. Diperinci pula mengenai pelaksanaan *Wehrkreise* yang meliputi petunjuk-petunjuk tak hanya untuk tentara, namun juga penduduk setempat dan rakyat pada umumnya.

Pelaksanaan *Wehrkreise* sendiri merupakan sebuah perwujudan dari kerja sama sipil-militer yang menerapkan konsep total people's defence. *Wehrkreise* memiliki arti 'lingkungan pertahanan' atau 'pertahanan daerah'. Dalam wilayah *Wehrkreise*, terhimpun kekuatan militer, politik, ekonomi, dan pendidikan terhimpun dan saling berdampingan (Pusat Sejarah TNI, 2004).

Kerja sama sipil-militer lewat perang gerilya berlanjut saat Jenderal Soedirman mengeluarkan Perintah Kilatnya pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 08.00 WIB. Sama seperti yang tertera dalam Perintah Siasat No.1, dalam perintah tersebut Jenderal Soedirman mengarahkan militer untuk berperang dan bertahan di desa-desa, gunung-gunung dan hutan belantara.

Wilayah Yogyakarta jadi saksi mata dari pertempuran gerilya Jenderal Soedirman bersama pasukannya untuk memukul mundur

pasukan Belanda. Meski para pemimpin militer mengetahui bahwa risiko dari perang gerilya akan memakan waktu sepanjang masa, namun mereka tetap menjalankannya. Perang gerilya akan terus berlangsung sampai cita-cita kemerdekaan Indonesia tercapai.

Taktik dasar dari perang gerilya adalah *hit and run*. Taktik seperti apakah itu? Secara sederhana, taktik perang gerilya bisa dibayangkan sebagai situasi memukul mundur kekuatan militer konvensional musuh yang notabene lebih kuat. Taktik perang gerilya ini juga dimaksudkan untuk menghindari perlawanan frontal agar para pejuang dapat menghemat amunisi dan tenaga. Terlebih lagi, perlawanan ini dilakukan di mana pun ada musuh, yang berarti tiap pelosok dapat menjadi medan pertempuran.

Tujuan utama dari strategi perang gerilya tidak lain adalah menurunkan kemauan berperang Belanda dengan makin besarnya biaya perang yang perlu ditanggung. Dengan beban yang begitu besar serta keberadaan yang jauh dari negara asal, taktik ini bermaksud menurunkan moril tentara Belanda. Dengan begitu, perjuangan lewat perang gerilya ini juga dimaksudkan untuk mengikis kemauan politik Belanda untuk terus berperang melawan Indonesia

Demi mewujudkan hal tersebut, para tentara yang bergerilya juga harus dapat hidup di tengah-tengah rakyat, harus sanggup menggunakan apa pun untuk melawan musuh, dan harus sanggup menghidupi diri dengan memakan makanan yang paling sederhana. Di sinilah, desa dan masyarakat yang ada di dalamnya memiliki peranan penting dalam mendukung perang gerilya yang dilaksanakan oleh TNI.

Rakyat dapat menghadirkan bantuan, baik secara fisik, maupun secara tidak langsung—dengan membantu kelancaran operasi logistik di lapangan serta dukungan makanan. Bahkan, ada juga beberapa yang menyumbangkan harta benda yang mereka miliki (Tashadi *et al.*, 1992)

Hal tersebut terlihat jelas dalam pelaksanaan perang gerilya di Yogyakarta. Salah satu daerah yang warganya terlibat larut dalam Perang Gerilya adalah desa-desa di wilayah Bantul. Di Imogiri misalnya, para warga desa tak hanya menampung para pengungsi, namun juga membantu pasukan militer untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Para penduduk desa bahkan mempersilakan para pejuang untuk menggunakan rumah-rumah penduduk sebagai markas mereka, misalnya di Desa Srunggo Imogiri, rumah-rumah penduduk dijadikan sebagai markas dari pasukan Kolonel Zulkifli Lubis, sementara Desa Kajor ditempati tokoh-tokoh militer seperti Latif Hendraningrat dan Sutopo Yuwono.

Selain itu, ada juga dapur umum yang menjadi bagian penting dari perang gerilya. Dapur umum ini pada dasarnya merupakan lokasi untuk memenuhi kebutuhan makanan para pejuang militer. Di saat yang bersamaan, dapur umum juga menjadi wadah tempat bertemunya pejuang dengan sipil.

Menariknya, warga setempat beserta para pejuang gerilya sama-sama memiliki kontribusi untuk mendanai dapur umum ini, misalnya dari kas desa, sumbangan dari perjuangan, iuran dari masyarakat, bahkan pinjaman dari beberapa orang.

Rumah sakit dan poliklinik milik warga sipil serta mereka yang bekerja di bidang kesehatan juga tak ketinggalan berkontribusi dalam perang gerilya. Salah satunya adalah rumah sakit darurat di Desa Segoroyoso. Di situ, Dokter Irsan bersama dua perawat dengan tangan terbuka merawat para pejuang yang jatuh sakit dan terluka.

Anggota Palang Merah Indonesia (PMI) juga punya jasa besar dalam merawat para gerilyawan dan penduduk setempat, membantu evakuasi penduduk, mengawal perjalanan, serta memberikan bantuan obat-obatan untuk yang terluka dan sakit.

Beberapa dari mereka bahkan dengan berani menggunakan posisinya yang terlindungi sebagai tenaga medis atau anggota PMI untuk membantu perjuangan melawan Belanda. Contohnya adalah Ibu Djoewariyah, seorang petugas PMI yang merangkap sebagai kurir yang bertugas untuk bertukar informasi dengan gerilyawan lain di Warung

Sate Puas, Desa Gamelan, kemudian menyebarkan informasi penting bagi republik.



Gambar 2.7: Anggota PMI sedang menolong korban dari akasi Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta, 28 Desember 1949.

Sumber: Arsip Nasional Republik (ANRI), IPPHOS 1945-1950 No.994.

Menjelang serangan umum Yogyakarta pada malam hari, rakyat ditempatkan di pinggir dan di dalam kota untuk membantu penyerangan, terutama dalam bidang logistik. Strategi ini mengejutkan Belanda dan dalam waktu enam jam, Yogyakarta sukses dikuasai oleh TNI dan rakyat. (Kartasasmita *et al.*, 1995).

Berkat taktik perang gerilya ini, para pejuang militer dari pasukan TNI dapat dengan gigih menyerang tentara Belanda hingga meninggalkan Yogyakarta berkat bantuan rakyat.

Keterlibatan pemuda dalam perang gerilya juga menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Pada saat itu, para pemuda dan pemudi dari pihak sipil juga dilatih untuk tugas-tugas seperti pengintaian, menghalangi jalan raya, hingga melakukan sabotase kereta api. Kemudian, juga dibentuk pasukan-pasukan tentara pelajar seperti di

Jawa yang dinamai Gerilya Desa, Pengawal Nagari di Sumatra Barat, dan Pertahanan Semesta di Sumatra Utara.

Dalam laskar-laskar pergerakan yang tersebar di berbagai penjuru daerah juga terdapat apa yang disebut sebagai barisan pelajar. Lewat gerakan tersebut, pelajar-pelajar yang berasal dari sekolah menengah turut mengambil peran sebagai tenaga-tenaga intelijen dalam perang gerilya.

Ketika terjadi Agresi Militer II Belanda, para pelajar ini juga memberikan bantuan pada bidang administrasi, penerangan, dan intelijen. Pelajar-pelajar tersebut bahkan memanfaatkan keahliannya di bidang masing-masing dalam mendukung perjuangan kemerdekaan.

Peranan pelajar dalam perang gerilya juga bisa dilihat dari terbentuknya satuan-satuan pergerakan pelajaran seperti Tentara Pelajar, Tentara Republik Indonesia Pelajar, dan Tentara Genie Pelajar.

Yang menarik, rakyat yang menjadi anggota badan dan laskar perjuangan dapat melebur secara struktural dan membaur dengan organisasi kemiliteran pada saat itu. Hal tersebut membedakan mereka dengan unsur-unsur masyarakat lain yang tidak bergabung dengan badan-badan perjuangan, misalnya pemerintah desa, yang tetap mempertahankan kedudukannya dan hanya sekadar mengalihkan seluruh kegiatannya untuk mendukung perjuangan bersenjata selama Perang Kemerdekaan.

Setelah kemenangan Indonesia tercapai, unsur-unsur masyarakat yang tidak bergabung dalam badan perjuangan dapat kembali melakukan tugasnya seperti biasa. Dengan cara itulah, pelaksanaan perang gerilya berkembang menjadi lebih efektif sejak tahun 1948.

Partisipasi rakyat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya datang dari para pria. Tidak sedikit perempuan yang turut serta dan dengan berani turun ke medan pertempuran.



Gambar 2.8: Para pelajar putri berpartisipasi membagi-bagikan bungkus makanan kepada para Tentara pelajar tahun 1948

Sumber: Ipphos dalam 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Di Bandung, bahkan terdapat partisipasi dari Laskar Wanita Indonesia (LASWI) yang anggotanya terdiri dari pelajar putri SMA dan Sekolah Guru Atas (SGA). Sejak awal pendiriannya, para anggota LASWI merasa ikut terpanggil oleh gelora revolusi.

Sebelum terjun ke tengah medan pertempuran, para anggota LASWI mendapatkan pembinaan fisik serta mental untuk dapat membantu para pejuang pria, baik secara fisik, maupun dari garis belakang. Mereka bahkan juga diberikan latihan-latihan kemiliteran seperti baris-berbaris, cara menggunakan senjata, taktik gerilya, intelijen, serta palang merah.

Pada saat pertempuran Bandung Lautan Api, para anggota LASWI turut ikut serta membantu para pejuang pria. Ketika itu, LASWI yang berkoordinasi dengan Markas Dewan Pimpinan Perjuangan ditugaskan untuk mengadakan dapur umum bernama Dapur Perjuangan di seluruh sektor Bandung serta mencari bahan dan mengirimkan makanan ke garis depan. Dengan penuh rasa tanggung

jawab, para pejuang perempuan yang menjadi anggota LASWI melaksanakan tugas-tugas tersebut tanpa takut dengan risiko yang ada di medan pertempuran (Departemen Pertahanan-Kepolisian Pusat Sejarah ABRI, 1983).

Sesungguhnya, kerja sama dari berbagai pihak di atas memiliki peranan yang sangat besar dalam menunjang perjuangan bangsa. Perang Gerilya adalah wadah bagi sipil dan militer untuk saling memberi dan menerima, juga saling melindungi.

Ketahanan di bidang logistik suatu wilayah menjadi kunci utama dalam memenangkan pertempuran berlarut. Pertempuran yang memakan waktu cukup lama ini akan sangat terbantu apabila dapat dukungan logistik yang mencukupi untuk personel di wilayah itu.

Dengan usaha bahu membahu ini, para pejuang militer dapat terus melancarkan perjuangannya bersama rakyat meski saat para pejuang sipil ditawan oleh Belanda. Karenanya, tidak berlebihan jika dibilang bahwa keberhasilan perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak akan pernah berhasil tanpa kontribusi dari rakyat (Baha Uddin *et al.*, 2020)

Dalam buku 'Yogyakarta: Jenderal Spoor (Operatie Kraai) versus Jenderal Soedirman (Perintah Siasat No. 1)', Soetanto (2006) pun menyebutkan bahwa pada saat itu, TNI memandang bahwa secara strategis, sebenarnya penentuan untuk mengakhiri perang berada di luar bidang militer, yaitu diplomasi. Upaya diplomasi diharapkan dapat mendorong Belanda untuk meninggalkan Indonesia. Namun, keberhasilan dari upaya diplomasi hanya dapat terjadi apabila disertai dengan dukungan militer yang dapat memojokkan Belanda.

Maka itulah, para pejuang militer dengan teguh menempat Belanda pada posisi yang sulit, tak hanya secara militer, namun juga politik dan ekonomi lewat strategi perang gerilya. Lewat pelaksanaan strategi perang yang melibatkan rakyat bersama TNI, Indonesia berhasil menunjukkan bahwa kehadiran Belanda di Indonesia tidak akan memberikan peluang bagi perdamaian dan perbaikan hidup rakyat, sebab perlawanan dan perang akan terus terjadi dengan didukung oleh rakyat.

Seorang penulis barat bernama Anthony Reid dalam tulisannya yang berjudul "*The Indonesian National Revolution 1945-1950*" menamai kerja sama sipil-militer yang berlangsung hingga 6 Juli 1949 ini sebagai 'Zaman Gerilya'.

Ia menyebutkan, ketika pihak Belanda mengakui kealahannya dan mengembalikan para pemimpin republik yang ditawan di Yogyakarta, para pejuang dari pihak militer sudah mengetahui bahwa keunggulan Belanda dalam hal persenjataan tidak lagi efektif. Hal ini dikarenakan para gerilyawan dapat menyerang hampir dari mana saja dari pangkal-pangkal yang ada di di daerah pedesaan.

Melalui pengalaman kerja sama sipil-militer masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan itulah, Perang Gerilya dapat dimaknai sebagai embrio, cikal bakal, dari kerja sama sipil dan militer di masa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

BAB III

**SOEKARNO DAN SOEDIRMAN
SEBAGAI TOKOH KERJA SAMA
SIPIL-MILITER**

Bab 3

Soekarno dan Soedirman sebagai Tokoh Kerja Sama Sipil-Militer

Lewat pembahasan mengenai perang gerilya pada bab sebelumnya, kita tidak hanya melihat bagaimana sipil dan militer bekerja sama pada masa peperangan mempertahankan kemerdekaan. Kita juga mengetahui bahwa Panglima Besar Jenderal Soedirman punya peranan yang sangat penting dalam menginisiasikan pelaksanaan perang gerilya.

Jika berbicara tentang tokoh perjuangan dari pihak sipil, presiden pertama kita, Soekarno, selalu menjadi nama yang berada di *top-of-mind* banyak orang. Sementara itu, Jenderal Soedirman boleh jadi adalah nama yang akan pertama terbesit saat membahas tentang tokoh perjuangan dari pihak militer.

Peranan, pandangan, serta kerja sama kedua tokoh besar tersebut merupakan esensi utama dari bab ini. Lewat dua sosok yang berbeda, kita dapat melihat sebuah cerminan akan bagaimana kerja sama sipil-militer dapat terlaksana di masa perjuangan yang bersejarah, yang perlu dijadikan pedoman bagi bangsa di masa kini.

3.1. Kerja Sama Sipil-Militer Perspektif Soekarno

Sebagai seorang pemimpin bangsa, Presiden Soekarno menaruh rasa hormat terhadap panglima besar TNI Jenderal Soedirman, para anggota angkatan bersenjata, dan juga jalan perjuangan yang mereka tempuh. Karenanya, Presiden Soekarno kerap menjunjung pentingnya bagi sipil dan militer untuk saling bahu membahu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu contohnya dapat dilihat lewat pesan Soekarno kepada Soedirman pada saat pertemuan historis di istana negara. Saat itu, Presiden Soekarno mengingatkan Panglima Besar untuk tidak

menghadapi Belanda secara frontal. Ia menyebut bahwa Belanda harus dihadapi secara perang gerilya, perang rakyat.

“Jangan hadapi Tentara Belanda di dalam kota karena akan membawa korban rakyat banyak. Tetapi bawalah tentara Belanda ke desa-desa, ke hutan-hutan, gunung-gunung, dan tentara Belanda sudah menjadi kelompok-kelompok kecil, seranglah dengan cara Perang Gerilya. Lakukan ini siang maupun malam, kita Insya Allah akan menang, karena kita di pihak yang benar, dan Tuhan akan selalu menolong dan melindungi kita semua.”

Melalui amanatnya tersebut, Presiden Soekarno meminta Jenderal Soedirman untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Republik Indonesia dan TNI masihlah ada. Ditegaskannya, kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang dicapai dengan perjuangan yang maha hebat yang disertai dengan pengorbanan serta penderitaan yang besar. Kemudian, Presiden Soekarno saat itu juga berkata:

“Soedirman, inilah pesanku kepadamu. Sebagai seorang prajurit, sebagai seorang jenderal, sorang pimpinan tertinggi TNI, jangan menyerah, besarkan jiwamu, tebalkan semangatmu, dan hidupkan kesetiaanmu kepada negara, tanah air, dan Bangsa Indonesia. Jenderal Soedirman, sampai kita bertemu lagi di tempat ini. Jika Bung Karno dan Bung Hatta ditembak mati oleh belanda, para pimpinan yang lain harus menggantikan.” (Soetanto, 2006)

Keberhasilan upaya perang gerilya di Yogyakarta yang dilakukan lewat kerja sama sipil-militer serta diwarnai oleh berbagai perjuangan dan pengorbanan pada akhirnya mendapatkan apresiasi dari sang pemimpin bangsa. Ketika Ibu Kota NKRI dipindahkan kembali ke Jakarta pada Bulan Desember 1949, Presiden Soekarno menyebut, “Yogyakarta menjadi termashur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu!” (Tashadi,*et al.*, 1992)

Sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno memang selalu menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan.

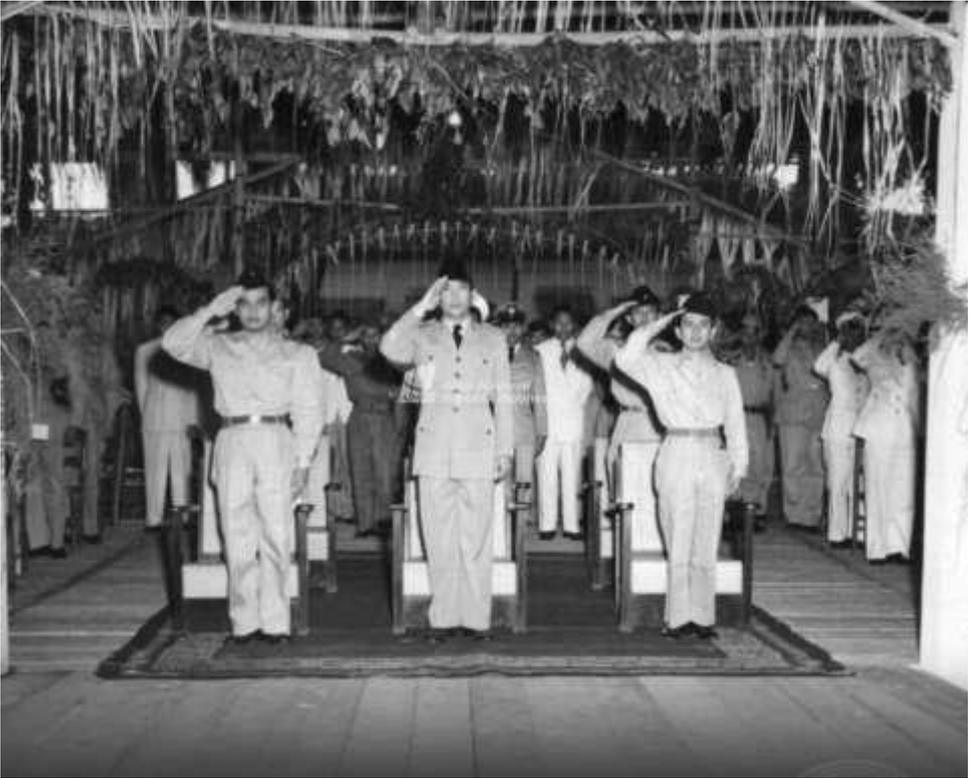
Dalam usahanya membangkitkan semangat rakyat untuk bangkit melawan Belanda, Presiden Soekarno dengan semboyannya “Sekali Merdeka Tetap Merdeka” senantiasa menegaskan bahwa untuk mendapat pengakuan dari dunia internasional, sebuah negara harus mempunyai daerah atau tanah air yang jelas batasnya, memiliki rakyat, memiliki pemerintahan yang diakui oleh rakyat, serta pemerintah memiliki alat-alat kekuasaan negara, di mana di dalamnya termasuk polisi, pamongpraja, dan tentara (Martowidjojo, 1999).



Gambar 3.1: Presiden Soekarno melantik Pucuk Pimpinan TNI di Istana Yogyakarta, Juni 1947

Ipphos dalam 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Selain itu, Presiden Soekarno dalam amanat Hari Angkatan Perang RI 1950 pun menegaskan bahwa angkatan perang kita tidak bisa dipisahkan kedudukannya dari rakyat Indonesia, yang menjadi tempat kelahiran dan membesarkan TNI.



Gambar 3.2: Presiden Soekarno menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-6 Angkatan Perangka di Jakarta, 5 Oktober 1951

Sumber: Kempen RI DKI Jakarta 1951 No. 4903, dalam situs resmi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Dalam pidato Presiden Republik Indonesia pada Hari Proklamasi 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno kembali menegaskan peranan TNI, yang saat itu bernama Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), sebagai tentara yang terbentuk dan tumbuh dari rakyat. Berikut adalah pidato Presiden Bung Karno yang dikutip dari *'Kepribadian Revolusi Bangsa Indonesia Berdasarkan 5 Amanat Bung Karno'* (Notosoetardjo, 1962)

“APRI bukan tentara yang berdiri terpisah daripada rakyat. APRI adalah sebagian daripada rakyat. APRI tumbuh dari revolusi sebagai bagian daripada rakyat yang ber-revolusi.

Persatuan rakyat dan terntara adalah unsur utama daripada hakiki negara dan angkatan perang kita.”

Berbagai perkataan Presiden Soekarno di atas telah menunjukkan bahwa sebagai pemimpin bangsa, sang *founding father* sangatlah menghargai keberadaan angkatan bersenjata Indonesia dan senantiasa mendorong sipil dan militer untuk senantiasa bekerja sama demi persatuan bangsa.

Di tengah-tengah situasi yang berisiko, sang presiden pun tak ragu untuk memercayakan Jenderal Soedirman dengan jalan yang ditempuhnya. Inilah bagaimana Presiden Soekarno menjadi cerminan yang mendukung kerja sama sipil-militer untuk kepentingan bangsa dan kedaulatan NKRI.

3.2. Kerja Sama Sipil-Militer Perspektif Soedirman

Senada dengan Presiden Soekarno, penekanan pada pentingnya kerja sama sipil-militer juga selalu dikemukakan oleh panglima besar kita, yaitu Jenderal Soedirman. Yang menarik, Jenderal Soedirman sendiri sebenarnya lahir dari latar belakang sipil, di mana dulunya beliau berprofesi sebagai seorang guru di HIS Muhammadiyah. Maka itu, sama seperti TNI yang lahir dari rakyat, Jenderal Soedirman pun juga berasal dari rakyat.

Pada masa awal pendudukan Jepang di Indonesia, sekolah tempatnya mengajar sempat ditutup, namun berkat perjuangan yang dilakukannya, sekolah tersebut akhirnya dibuka kembali.

Jiwa kepemimpinan dan perjuangan Jenderal Soedirman memang sudah terlihat sejak lama. Kala itu, rakyat berada dalam kondisi yang menyulitkan mereka untuk mencari bahan makanan. Di tengah keadaan tersebut, Soedirman aktif membina badan pengurus makanan rakyat.

Pada pertengahan tahun 1943, Soedirman menjadi salah satu tokoh masyarakat yang ditunjuk untuk mengikuti latihan PETA angkatan kedua di Bogor. Selesai Pendidikan, ia diangkat menjadi *daidanco* (komandan batalyon) berkedudukan di Kroya, Banyumas. Di

sanalah, Soedirman memulai karirnya sebagai seorang prajurit (Pusat Sejarah TNI, 2004).

Lewat perjuangannya sebagai pemimpin militer, berbagai langkah yang ditempuh oleh Jenderal Soedirman melengkapi beragam upaya diplomasi yang dijalankan oleh Presiden Soekarno sebagai pemimpin dari pihak sipil. Diplomasi tidak bisa berjalan tanpa perjuangan bersenjata, dan begitu juga begitu sebaliknya.

Peran Soedirman yang menentukan, misalnya, ditunjukkan ketika Presiden Soekarno ditangkap Belanda saat penyerbuan ke Ibu Kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Di tengah kondisi yang mengancam kedaulatan tanah air tersebut, terjadi pertemuan historis antara Presiden Soekarno dan Panglima Besar Jenderal Soedirman di Istana Negara Yogyakarta.

Pertemuan ini dilakukan dalam rangka peralihan kekuasaan RI kepada PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Sebelum meninggalkan Istana Negara, Soedirman mengeluarkan Perintah Kilat No 1 Tahun 1948 sebagai kelanjutan dari Perintah Siasat No 1 Tahun 1948.

Dalam perintah kilat inilah, Soedirman memanggil seluruh unsur angkatan perang untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghadapi Belanda secara militer, yaitu melakukan perang gerilya yang telah dibicarakan dalam perintah Siasat No.1 yang dikeluarkan saat rapat TKR pada 12 Mei 1948 (Baha Uddin, *et al.*, 2020). Menggeloranya perang gerilya yang mempersatukan rakyat dan tentara yang menggelora ini menjadi bentuk awal dari Sishankamrata.



Gambar 3.3: Pertemuan antara Panglima Besar Soedirman dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta di Istana Yogyakarta, 10 Juli 1949

Ipphos dalam 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Meski dengan penyakit *tuberculosis* yang dideritanya, Jenderal Soedirman tetap bersikeras untuk turun langsung ke medan perang dan bergerilya bersama pasukan tentara yang didukung oleh rakyat di sekitar rute gerilya. Puncak perjuangan gerilya yang dipimpin Soedirman terwujud dengan keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949, di mana para pejuang militer berhasil merebut dan menguasai Kota Yogyakarta dari tangan Belanda, meskipun hal itu hanya bertahan selama 6 jam.

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret bahwa perang gerilya yang terjalin atas kerja sama rakyat dan militer punya andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keputusannya yang berani itu juga telah memengaruhi semangat para pejuang politisi sipil serta mengintervensi keberadaan Belanda di Indonesia oleh dunia Internasional.

Langkah Soedirman tersebut menjadi sebuah pintu yang membuka kesempatan bagi Indonesia menuju kemenangannya. Saat itu, Belanda hanya memandang Soekarno-Hatta dan para politisi sipil sebagai pusat yang perlu diperhitungkan dalam perang. Mereka berpikir bahwa dengan menduduki ibu kota dan menangkap Soekarno-Hatta, Republik Indonesia secara otomatis dapat dirubuhkan. Namun itu perkiraan yang keliru. Dengan adanya pemerintahan PDRI serta TNI yang tetap berdiri tegak, NKRI pun dapat tetap bertahan. (Pusat Sejarah TNI, 2004)

Keberhasilan Jenderal Soedirman ini menunjukkan bahwa perang gerilya yang terjalin atas kerja sama rakyat dan militer punya andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keputusannya yang berani itu juga telah memengaruhi semangat para pejuang politisi sipil serta mengintervensi keberadaan Belanda di Indonesia oleh dunia Internasional.

Tak berbeda dengan Presiden Soekarno, inti dari Perang Gerilya bagi Jenderal Soedirman tak lain adalah menyatunya militer dengan sipil. Mereka yang berasal dari desa-desa, gunung-gunung dan pantai, hingga hutan, seluruh sipil punya andil dalam perjuangan ini. Tempat-tempat tersebut juga menjadi tempat berlindung, sumber perolehan kebutuhan logistik, dan sekaligus tempat militer mempersiapkan diri untuk memulai penyerangan.

Meski pernah kecewa atas keputusan mengenai gencatansenjata yang disetujui oleh para pejuang sipil lewat Pernjanjian Renville, kala itu Jenderal Soedirman menegaskan bahwa keselamatannegara harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri (militer)sendiri. Karena itulah, Jenderal Soedirman menginstruksikan TNI untuk berpindah ke wilayah yang dikuasai republik.

Panglima Besar ini punya keyakinan bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas himpunan runtunan ribuan jiwa dan harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh siapa pun juga. Maka itu, meski punya kedudukan yang tinggi dalam tubuh militer, ia dikenal sangat menghormati hak-hak dan harta benda rakyat dalam bergerilya.

Ini dapat dilihat dalam dalam maklumat Jenderal Soedirman untuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dikemukakan pada tahun 1946.

“Sudah pada waktunya pula para pemimpin dari segala badan-badan, baik dari pemerintah, ataupun dari pihak Rakyat mempersatukan diri dengan menghilangkan segala perselisihan kecil-mengecil di antara kita, membentuk suatu National front terhadap kejadian yang sudah lama dinantikan seluruh rakyat Indonesia...” – Panglima Besar Soedirman, 1946. (Suryokusumo, *et al.*, 2016)

Saat pasukan TNI yang dipimpin olehnya diharuskan hijrah ke Yogyakarta, beliau pun terus berupaya mengobarkan semangat pasukannya, sambil tetap mengedepankan keamanan sipil. Dalam pidatonya di Borobudur, Jenderal Soedirman mengatakan:

“Percaya dan yakinlah, bahwa kemerdekaan suatu negara, yang didirikan di atas timbunan runtuhannya ribuan jiwa-harta-benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapa pun juga. Berjuang terus. Saya tetap memimpin kamu sekalian. Tuhan, Insya Allah melindungi perjuangan suci kita.” (Pussemad, Sejarah Organisasi MABAD, halaman 46)

Bagi Jenderal Soedirman, rakyat dan tentara itu bagaikan air dan ikan, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengakui bahwa rakyat telah menjadi pelindung dan sekaligus mata dan telinga bagi para pejuang yang sedang bergerilya di hutan sekitar perkampungan. Bekal logistik untuk mendukung anak buahnya juga berasal dari lumbung rakyat yang terpaksa harus dibeli dengan uang hasil penjualan perhiasan istrinya.

Jenderal Soedirman dikenal sebagai sosok sederhana yang enggan untuk menonjolkan diri. Sebagai Panglima Besar TNI, ia pun kerap menomorsatukan kepentingan nasional (Santoso, *et al.*, 2014)

Dengan integritas, kesederhanaan, semangat juang, serta sikap pantang menyerahnya, anak buahnya serta rakyat pun rela berkorban untuk membela perjuangannya. Berbagai langkahnya telah menjadi contoh dan ilham bagi para pasukan militer TNI dalam membina wilayah teritorial di masa damai hingga saat ini.

3.3. Refleksi Kerja Sama Sipil-Militer dari Dua Sosok Pemimpin Bersejarah



Gambar 3.4: Presiden Soekarno sedang berbincang – bincang dengan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Dari pembahasan di atas, kita bisa melihat bahwa meski kedua pemimpin besar di masa itu memang memiliki perbedaan pandangan dalam beberapa hal, Presiden Soekarno dan Jenderal Soedirman tetap memiliki visi dan cita-cita yang sama untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan persatuan Indonesia, sehingga keduanya senantiasa siap sedia untuk saling bahu membahu dan mendukung tindakan dan upaya satu sama lain.

Jalanan kerja sama di antara keduanya dapat dilihat dari berbagai peristiwa. Selain pada saat pertemuan historis di Istana

Negara Yogyakarta pada bulan bulan Agustus 1949, contoh lainnya bisa kita lihat ketika Jenderal Soedirman menulis surat permohonan yang ditujukan kepada Presiden Soekarno. Lewat surat tersebut, beliau bermaksud mengungkapkan niatnya untuk berhenti dari dinas militer dalam rangka memulihkan kesehatannya serta mengurus keluarga.

Setelah ia mengutarakan niatnya tersebut, Presiden Soekarno menjawab, “Kalau Dimas Dirman mengundurkan diri, saya akan berhenti juga dari jabatan presiden.”

Meski harus mengorbankan keinginan dan kepentingan pribadinya, Jenderal Soedirman tetap mengutamakan kepentingan nasional dan pada akhirnya menarik kembali surat permohonan itu. Di sisi lain, pernyataan Presiden Soekarno saat itu menunjukkan bahwa sang pemimpin negara begitu menghargai keberadaan Jenderal Soedirman sebagai panglima besar dan pemimpin militer saat itu.

Tak berbeda, Jenderal Soedirman pun juga menaruh rasa hormat dan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Soekarno. Santoso, *et al.*, (2014) dalam buku berjudul Sejarah Reformasi TNI menyebut bahwa sang panglima besar selalu memilih berpihak kepada pemerintah yang sah, walaupun beberapa kali terdapat kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan, contohnya ketika para pemimpin bangsa ditawan oleh Belanda di tengah Agresi Militer II tahun 1948.

Saat itu, Jenderal Soedirman tetap mengutamakan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan memilih untuk bergerilya bersama rakyat sebagai satu-satunya pemegang kendali angkatan bersenjata Indonesia kala itu. Setengah tahun kemudian, Jenderal Soedirman pun tetap menyatakan kepatuhannya saat para pemimpin pemerintahan yang dibebaskan oleh Belanda.

Maka itu, kerja sama antara Soekarno yang merupakan tokoh pemimpin dari pihak sipil dengan Soedirman yang merupakan tokoh pemimpin dari pihak militer pun telah berpengaruh terhadap dimulainya perang gerilya yang menjadi esensi perjuangan bangsa di masa lampau, dan pada perkembangannya menjadi embrio kerja sama sipil-militer yang berlangsung hingga masa kini.

Lewat dua sosok inilah, kita mendapatkan cerminan dari bagaimana kerja sama sipil-militer Indonesia harus dilaksanakan.

Dengan melampaui perbedaan yang ada, kedua belah pihak tak pernah berhenti untuk mendukung perjuangan satu sama lain demi tujuan yang satu, yaitu kemerdekaan dan kedaulatan NKRI.

BAB IV

PERKEMBANGAN KERJA SAMA SIPIL-MILITER INDONESIA

Bab 4

Perkembangan Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia

Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kita sudah melihat bagaimana kerja sipil-militer senantiasa diwarnai dengan pasang dan surut. Meski begitu, kedua belah pihak tetap terus saling membantu dan berkoordinasi untuk mencapai satu tujuan, yang salah satunya ditunjukkan lewat sinergi antara rakyat dan tentara dalam perang gerilya.

Pasca kemerdekaan pun tidak berbeda. Selalu ada perkembangan yang patut diketahui dan dijadikan pedoman oleh generasi penerus bangsa. Dinamika dalam kerja sama sipil dan militer setelah Indonesia sukses mempertahankan kemerdekaannya terkait erat dengan fakta bahwa bangsa kita sangatlah kaya akan keanekaragaman, mulai dari suku, agama, golongan, hingga ideologi politik.

Sama seperti di masa lalu, di saat ada perdebatan, ada juga jalinan. Meski dengan segala pertentangan yang ada, kerja sama sipil-militer tetap eksis hingga masa kini dan bermaksud terus menuju ke arah yang positif.

Lewat bab ini, kita akan mengetahui lebih banyak soal dinamika kerja sama sipil-militer dari masa lalu hingga masa sekarang, mulai dari konsep jalan tengah yang dicetuskan oleh A.H. Nasution, hingga bagaimana kerja sama masyarakat dan tentara terjalin di era globalisasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam hal pengembangan industri pertahanan.

4.1. Kerja Sama Sipil-Militer di Peristiwa DI/TII, Permesta, dan G30S/PKI

Setelah melalui serangkaian perjuangan bersenjata serta upaya perundingan, kedaulatan Indonesia akhirnya diakui Belanda pada akhir 1949. Indonesia sudah merdeka, penjajah sudah tak ada, dan kemerdekaan sudah jadi milik kita. Lantas, apa yang perlu diperjuangkan oleh sipil maupun militer di masa ini? Jawabannya: ada banyak. Ternyata, masih terdapat macam-macam pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh bangsa--baik sipil maupun militer—meski setelah Indonesia merdeka.

Jika menilik kembali perjuangan di masa revolusi, pihak sipil memiliki tugas utama dalam urusan politik dan diplomasi. Di sisi lain, perjuangan bersenjata adalah porsi milik militer. Setelah perjuangan mempertahankan kemerdekaan usai, kerja sama sipil-militer di masa lalu hingga masa kini difokuskan kepada bagaimana kedua belah pihak bersama-sama mengelola tanah air.

Dalam hal tersebut, penumpasan berbagai gerakan pemberontakan seperti DI/TII, Permesta, G30S/PKI yang mendapatkan bantuan dari masyarakat, dan lainnya sebagainya menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kerja sama sipil-militer di era pasca revolusi.

Pada masa ini, umumnya peran masyarakat sipil tidak lagi terlibat langsung memegang senjata, namun lebih kepada peran bantuan logistik, informasi, dukungan kesehatan, dan lain sebagainya.

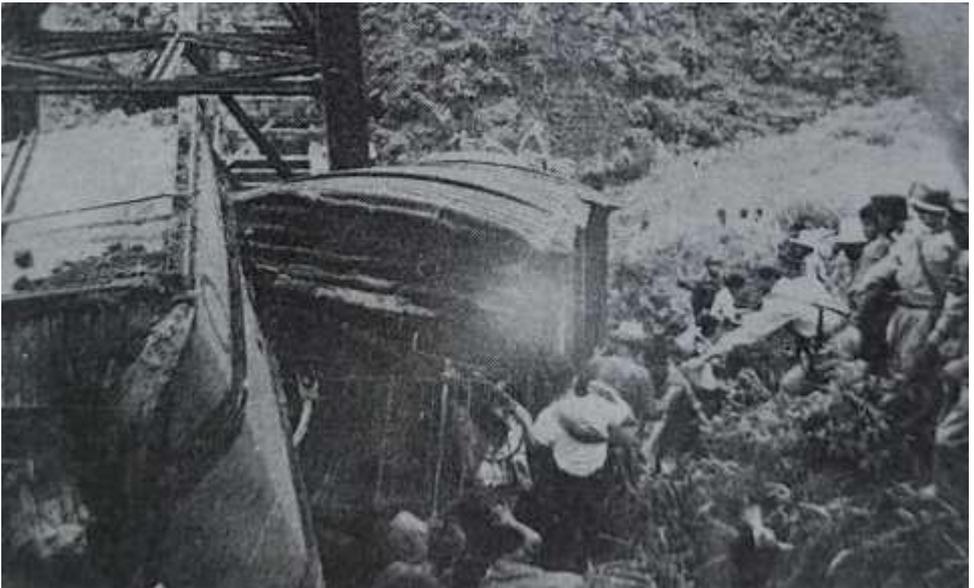
Salah satu contoh penting dalam pelaksanaan kerja sama sipil-militer di masa ini dapat dilihat lewat penumpasan pemberontakan di Indonesia, salah satunya adalah pemberontakan DI/TII yang mengganas di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Pemberontakan ini memiliki tujuan untuk mendirikan “Negara Islam Indonesia”.

Pemberontakan DI/TII sendiri dimulai sejak masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada Februari 1948, dan terus berlanjut hingga Indonesia memperoleh kembali kedaulatannya, tepatnya hingga tahun 1962

Dalam menumpas pemberontakan ini, TNI dengan sigap melindungi rakyat dari ketakutannya dalam melawan laskar yang membelot tersebut. Peristiwa pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwirjo memang dilakukan dengan sangat brutal. Para

pemberontak melakukan kejahatan dengan merampok dan membunuh rakyat yang tidak berdosa secara kejam. Bahkan, mereka dengan tega menjebak dan menyembelih rakyat. Pada suatu kesempatan, mereka juga meracuni Divisi Siliwangi setelah mengundang mereka makan bersama-sama.

Kekejaman ini mendorong TNI dan rakyat untuk bekerja sama melawan para pemberontak. Pertempuran antara Pasukan Siliwangi dengan pasukan pemberontak DI/TII pertama kali terjadi pada tanggal 25 Januari 1949. Dengan dibantu oleh berbagai eselon divisi-divisi TNI AD lainnya, Pasukan Siliwangi menggelar kerja sama bersama rakyat.



Gambar 4.2: Gerbong-gerbong kereta api digulingkan ke jurang dari sebuah jembatan yang telah dirusak oleh gerombolan DI/TII di daerah Malangbong, Priangan Timur, 1957

Sumber: Disjarahad dalam 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: Masa Perang Kemerdekaan, Konsolidasi Awal, dan Masa Integrasi (1945-1965)

Pelaksanaan kerja sama sipil-militer dalam menumpas pemberontakan DI/TII dimulai pada tahun 1960 oleh kesatuan Yon 328/Kujang II yang saat itu dipimpin oleh Mayor Banuarli. Operasi tersebut dilaksanakan di daerah sebelah selatan Keresidenan Banten.

Saat itu, rakyat dengan suka rela melaksanakan kerja sama dengan untuk menghantam dan menghancurkan pemberontakan DI/TII setelah melihat bagaimana TNI berupaya melindungi rakyat dari kekejaman DI/TII. Hanya dalam waktu satu minggu saja, massa rakyat rela bergerak untuk membantu TNI. Operasi tersebut berjalan dengan sukses hingga Keresidenan Banten kembali aman dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 5 bulan.

Setelah daerah Banten diamankan, pelaksanaan kerja sama sipil-militer dalam menumpas pemberontakan DI/TII beralih ke daerah-daerah lain, salah satunya Keresidenan Bogor, tepatnya di Gunung Salak.

Di situ, kesatuan Yon 328/Kujang II kembali menyelenggarakan kerja sama dengan warga sekitar lewat penyusunan taktik operasi yang resmi dinamai sebagai operasi Pagar Betis. Operasi tersebut mengizinkan rakyat untuk membantu kesatuan yang bertugas menghadang para pemberontak di sekeliling Gunung Salak. Operasi ini dilakukan dengan ketentuan dalam setiap jarak 500 meter dan dari penghadang massa rakyat, ditempatkan seorang tentara bersenjata untuk melindungi rakyat. Sementara itu, pasukan Yon 328/Kujang II ditugaskan untuk memasuki daerah pengunungan yang menjaditempat persembunyian Kartosuwirjo.

Operasi Pagar Betis ini berjalan dengan sukses. Lewat penghadangan yang begitu ketat, TNI bersama rakyat mencegah Kartosuwirjo dan pasukan pemberontak untuk melakukan komunikasi dengan para pendukungnya, sehingga persediaan makanan mereka menjadi sangat minim dan mereka mengalami kelaparan.

Operasi tersebut berhasil menekan moril para pemberontak, di mana mereka menemui kesulitan untuk melanjutkan perjuangannya akibat kelaparan dan pengejaran yang terus berlangsung. Satu persatu pemberontak pun mulai menyerahkan diri kepada pos-pos penghadang, sampai akhirnya Kartosuwirjo dan pendukungnya tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962. (Disjarahdam VI/Siliwangi, 1979).

Lewat usaha penumpasan pemberontakan DI/TII, TNI telah memberikan tempat bagi masyarakat sipil untuk ikut serta dalam perjuangan dan upaya memulihkan kampung halaman mereka. Upaya

penumpasan pemberontakan DI/TII tersebut merupakan bentuk nyata dari kerja sama sipil-militer di masa lalu yang sangat signifikan, karena berkat upaya tersebutlah, sipil dan militer kembali menunjukkan pentingnya kerja sama di antara kedua belah pihak dalam rangka mempertahankan persatuan Indonesia.

Ketika terjadi pemberontakan G30S PKI pun, TNI kembali melaksanakan kerja sama dengan rakyat. Sama seperti gerakan pemberontakan lainnya, pemberontakan PKI juga sering kali menimbulkan teror dan kekejaman terhadap rakyat.

Misalnya dalam Peristiwa Kanigoto 13 Januari 1965, PKI berusaha mengintimidasi partai-partai politik dan organisasi massa Islam. Namun usaha tersebut gagal karena organisasi partai politik dan organisasi massa Islam melakukan upaya untuk membendung intimidasi dan pengaruh komunis ke dalam organisasi mereka dengan cara memperkuat keislaman anggotanya (Pusjarah TNI, 2010).

Dalam aksi pemberantasan sisa-sisa pemberontak PKI, TNI membantu Komando Operasi Merapi yang dipimpin langsung oleh Dan Men Parako AD Kolonel Sarwo Edhie. Saat itu, G30S PKI memang banyak mengerahkan pengikutnya dalam meneror dan mengacau. Namun Pemerintah NKRI berhasil menumpas gerakan-gerakan pemberontak tersebut dengan tak hanya mengerahkan kekuatan TNI, namun juga mengerahkan massa rakyat.

Untuk itu, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) memberikan latihan-latihan dasar kemiliteran dan mengajari rakyat untuk mempergunakan senjata serta menjalankan taktik untuk memelihara keamanan kampung tempat tinggal mereka. Berkat kerja sama sipil-militer tersebut, semangat rakyat pun dapat bangkit dan mempercayai segala upaya TNI dalam memulihkan keamanan dan ketertiban dari kengerian G30S PKI.

Lebih lanjut, kerja sama sipil-militer dalam menumpas G30S PKI tersebut dilancarkan dalam sebuah operasi pada tanggal 9 Desember 1965. Rakyat sipil yang telah mendapatkan pelatihan saat itu mengepung sarang gerombolan PKI yang terdapat di daerah Merbabu bersama-sama dengan TNI.

Di operasi tersebut, gembong-gembong G30S PKI tertembak mati dan kedudukan mereka makin terjepit. Berkat keberhasilan ini, kekuatan G30S PKI di Jawa Tengah makin menurun dan pengikutnya di berbagai daerah menyerahkan serta membubarkan diri (Dinas Sejarah Angkatan Darat, 2010).

Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) meletus pada Februari 1958 setelah lahirnya Piagam Perjuangan Semesta di Makasar pada Maret 1957 (Disjarahdam VI/Siliwangi, 1979).

Dalam rangka menumpas Permesta, dilaksanakan beberapa Operasi yang tersebar di Sulawesi Utara dan Tengah, seperti Operasi Sapta Marga II dan Operasi Sapta Marga III sebagai bagian dari Operasi Merdeka.

Sebelum Operasi Sapta Marga II dilaksanakan, politisi sipil asal Gorontalo Nani Wartabone sebenarnya telah memimpin upaya untuk membebaskan Gorontalo dari tangan pemberontak pada tanggal 25 Februari 1958.

Namun, gerakan pembebasan ini tidak sempat mendapatkan bantuan, sehingga Gorontalo jatuh kembali ke tangan Permesta, dan Nani beserta kelompoknya terpaksa melakukan gerilya di sekitar kota.

Ketika pasukan TNI yang tergabung dalam operasi Sapta Marga II hadir di Gorontalo, wilayah tersebut akhirnya berhasil direbut kembali, tepatnya pada tanggal 19 Mei 1958. Bantuan yang datang dari TNI bagi perjuangan Nani Wartabone ini merepresentasikan kerja sama sipil-militer dalam menumpas pemberontakan Permesta pada masa itu.

Sementara itu, Operasi Sapta Marga III melibatkan 35 Anggota Divisi Siliwangi dan 44 orang Mahasiswa, Pelajar, dan Pegawai. Dalam operasi ini, mereka ditempatkan sebagai *combat-Troop* atau Pasukan Makaminan, yang ditugaskan merebut Sangir-Talaud pada bulan Mei 1958 (Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1979).

Dari pembahasan di atas, kita dapat melihat bagaimana kerja sama sipil-militer berperan mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI di masa yang cukup berat dan diwarnai oleh berbagai gerakan pemberontakan di masa lalu.

Berkat bantuan-bantuan yang datang dari pihak sipil, seperti misalnya informasi terkait keberadaan tokoh-tokoh pemberontak, TNI dapat menjalankan tugasnya sebagai tentara rakyat. Ini menunjukkan bahwa militer dan sipil adalah dua pihak yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan air dan ikan.

4.2. Sipil-Militer dalam Jalan Tengah Nasution

Terdapatnya aksi-aksi pemberontakan pasca perjuangan kemerdekaan sesungguhnya menunjukkan bahwa Indonesia mengalami ketidakstabilan sosial politik pada masa itu. Hal ini membuat beberapa tokoh militer merasa perlu terlibat dalam kehidupan sosial politik. Untuk mendukung kehidupan sosial politik masyarakat yang terus mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa, militer punya keinginan untuk melaksanakan perannya sebagai bagian penting dari bangsa.

Saat itulah, tokoh militer Abdul Haris Nasution mencetuskan konsep 'Jalan Tengah'-nya. Kepada Presiden Soekarno, beliau mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan sebuah konsep yang akan memberikan peluang bagi militer, khususnya Angkatan Darat, untuk berperan terbatas dalam pemerintahan sipil (Notosusanto, 1970).

Ide Nasution ini bukannya tanpa alasan. Nasution saat itu menyatakan bahwa keberadaan TNI berbeda dengan militer di negara Barat. TNI bukan hanya sebagai alat pemerintahan di bawah kendali sipil, tapi juga bukan seperti militer di Amerika Latin yang memonopoli kekuasaan.

TNI, menurutnya adalah tentara yang berjuang bahu membahu dengan rakyat. Karena itulah, ia mencetuskan jalan tengah yang dimaksudkan sebagai sebuah 'pembeda' TNI dengan militer di negara-negara lain (Aspinall, 2005 dalam Sundari, 2017). Digagaskan oleh Nasution, 'Jalan Tengah' ini merupakan suatu bentuk 'tawaran' untuk memposisikan peran militer di dalam konteks kehidupan Indonesia, yang berada di tengah-tengah politik kenegaraan Indonesia.

Lewat Jalan Tengah, disepakati dan ditetapkan bahwa militer dapat memberikan perbantuan bagi usaha dan kegiatan masyarakat di luar perannya di bidang militer, misalnya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Notosusanto, 1970). Dengan munculnya konsep Jalan Tengah, boleh dikatakan bahwa kerja sama sipil-militer di periode ini mulai terikat erat dengan keterlibatan militer dalam kehidupan sosial di Indonesia. (Tim Penyusun Buku Hubungan-Sipil Militer, 1999).



Gambar 4.2: Presiden Soekarno dan Kolonel A.H Nasution
Foto: Arsip Nasional Republik Indonesia

4.3. TNI-ABRI Masuk Desa sebagai Perwujudan Kerja Sama Sipil-Militer

Saat berubah nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), para perwira militer juga pernah begitu dekat dengan rakyat berkat sebuah pelaksanaan kerja sama sipil-militer yang dinamai program

ABRI Masuk Desa. Program ini dicetuskan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal M. Jusuf pada tahun 1980.

Dalam program ini, desa dipilih oleh ABRI sebagai sasaran pembangunan karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di desa. Terlebih lagi, desa merupakan basis pertahanan rakyat dalam hal bela negara, termasuk juga desa-desa di daerah perbatasan.

Di dalam buku Sewindu TNI-ABRI Masuk Desa tahun 1980-1988, program TNI-ABRI Masuk Desa (AMD) disebut sebagai perwujudan dari rasa keprihatinan ABRI terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat pedesaan. Maka itu, ABRI bermaksud menangani langsung permasalahan-permasalahan di desa dengan bekerja sama langsung dengan para penduduk setempat (Poesponegoro & Notosusanto, 1993).

Terjalannya kerja sama sipil-militer pada masa ini memberi dampak pada terciptanya kestabilan nasional untuk pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat.

Sebagai kegiatan yang menjadi perwujudan nyata dari Kemanunggalan TNI-ABRI dan rakyat, program TNI-ABRI Masuk Desa menjadi upaya pemerintah dalam membangun desa-desa di mana aparat pemerintah dan rakyat sangat membutuhkan bantuan. Sehingga, ABRI hadir untuk membantu, mendorong, serta merangsang masyarakat pedesaan untuk membangun desanya sesuai dengan program pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, program Kegiatan TNI-ABRI Masuk Desa mencakup kegiatan fisik dan non-fisik dalam tiga bidang, yaitu Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Bernegara, Bidang Kesadaran Belanegara termasuk Kesadaran/ketentraman serta Ketertiban Masyarakat di daerah pedesaan.

Pembangunan Desa menjadi bagian integrasi dari Pembangunan Nasional karena desa memiliki arti yang sangat strategis. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa 80% lebih rakyat Indonesia bermukim di desa. Desa merupakan basis pembangunan Nasional dan landasan Ketahanan Nasional bagi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan pembangunan Desa, atas landasan idologi Pancasila akan mendorong keberhasilan pemerataan pembangunan dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas wilayah yang sehat dan dinamis.



Gambar 4.3: Selain Menjalankan Fungsi Keamanan dan Pertahanan, ABRI juga menjalankan fungsi social dan politik lewat program ABRI Masuk Desa (AMD)

Foto: Puspen TNI

Dengan berlakunya UU No. 20/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dengan penjabarannya, kegiatan ABRI Masuk Desa dapat dijadikan pendekatan dalam upaya memasyarakatkan pembelaan Negara, terutama di desa-desa, di mana desa berfungsi sebagai pangkal perlawanan rakyat dalam Sishankamrata. Bela Negara merupakan Langkah awal, dalam memasyarakatkan upaya pertahanan rakyat, karena itu program kegiatan TNI-ABRI Masuk Desa juga mencakup masalah-masalah tersebut.

Sasaran dalam mewujudkan strategi Kemangunggalan ABRI dan Rakyat melalui upaya kegiatan TNI-ABRI Masuk Desa adalah peran

aktif serta pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya agar masyarakat Indonesia seluruhnya menuju terwujudnya masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.

Selain itu, sasaran lainnya adalah mewujudkan Kemanunggalan ABRI dan Rakyat sebagai modal dasar Persatuan dan Kesatuan Nasional yang akan menjamin kelangsungan Pembangunan Bangsa dan Negara.

Pemantapan dan pengembangan doktrin Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas) dalam rangka mempersiapkan desa sebagai pangkal perlawanan rakyat semesta juga menjadi sasaran dalam strategi Kemanunggalan ABRI dan Rakyat.

Dengan diresmikannya UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, maka peranan strategi Kemanunggalan ABRI dan Rakyat dalam mewujudkan pertahanan keamanan negara, dengan TNI-ABRI sebagai kekuatan inti, dan Rakyat terlatih sebagai kekuatan dasar sudah dilembagakan.

Usaha memasyarakatkan pertahanan dan Keamanan Negara melalui UU No. 20/1982 dengan strategi Kemanunggalan ABRI dan Rakyat, program kegiatan TNI-ABRI Masuk Desa, merupakan langkah awal dalam upaya pembakuan dan memasyarakatkan sistem pembinaan teritorial untuk membantuk rakyat pedesaan dalam rangka membangun pedesaan seutuhnya, terutama yang menyangkut kebutuhan nyata baik bidang fisik materill maupun mental spiritual.

Melalui program ini pula diselenggarakan upaya Pemasyarakatan UU No. 20 tahun 1982 baik melalui penyuluhan maupun bimbingan dalam rangka bela negara.

Secara lebih detail, Program TNI-ABRI Masuk Desa memiliki lingkup tujuan sebagai berikut:

- 1) TNI-ABRI yang berasal dari rakyat harus mengenal lebih dekat dengan rakyat dan menghayati kehidupan masyarakat
- 2) Membantu meningkatkan pengetahuan keterampilan taraf hidup rakyat desa, melalui peranan dinamisasi pembangunan desa, dinamisasi peran serta seluruh rakyat

- 3) TNI-ABRI lebih mengenal pula adat istiadat/budayanya. Sebagai upaya awal memasyarakatkan implementasi pembudidayaan Wawasan Nusantara



Gambar 4.4: Pelaksanaan program ABRI Masuk Desa (AMD)

Foto: Puspen TNI

Lebih lanjut, terdapat juga beberapa hubungan fungsional program TNI-ABRI Masuk Desa dengan pembinaan teritorial atau binter. Pembinaan teritorial merupakan pendekatan TNI-ABRI yang telah dikembangkan secara khas di Indonesia dalam kerangka Sishankamrata.

Landasan tujuan dari Binter adalah mewujudkan wilayah dengan segenap isinya menjadi ruang, alat, dan kondisi juang bagi Kepentingan Hankamnas. Upaya pembentukan ruang, alat dan kondisi juang tersebut merupakan fungsi teknis yang dibinatangalkan oleh Kasad, dan dilaksanakan melalui jalur-jalur Komando Teritorial. Tetapi sebagai fungsi umum, yang hakikat tujuannya adalah menjamin dan

memelihara Manunggalnya ABRI-Rakyat, Binter merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran ABRI.

Program TNI-ABRI Masuk Desa mencerminkan pelaksanaan dari fungsi umum Binter, yang telah terbukti sangat efektif Memanunggalkan ABRI-Rakyat. Kemauan dan partisipasi rakyat pedesaan, baik dalam meningkatkan kesejahteraan maupun pembangunan lingkungan masing-masing dapat ditumbuhkan dengan pesat.

Program ABRI-Masuk Desa menjadi pendekatan yang bersifat akseleratif strategis, sehingga hasil yang diperoleh perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memantapkan mekanisme serta tata cara Binter yang sudah ada.

Perpaduan antara strategi dan program Binter dengan Program TNI-ABRI Masuk Desa perlu diarahkan untuk menumbuh dan memantapkan lembaga-lembaga pembinaan masyarakat yang ada, termasuk upaya untuk memantapkan kewibawaannya, meningkatkan keterampilan serta memantapkan mekanismenya.

Dalam ketentuan-ketentuan pengerahan Satuan-Satuan TNI-ABRI dan Non ABRI, bahwa penggunaan pasukan TNI-ABRI dalam penugasan ABRI Masuk Desa adalah pasukan yang telah dimantapkan dan dipersiapkan dengan keterampilan khusus dengan pengetahuan non militer, terutama untuk kegiatan penyulihan, penerangan, ceramah-ceramah, dan kegiatan lainnya.

Sedangkan bagi unsur non-ABRI, dasar keikutsertaan rakyat adalah asas peran serta secara spontan untuk Manunggalnya ABRI dan Rakyat dengan tidak merugikan kepentingan rakyat. Keikutsertaan tersebut harus digaris bawahi bahwa apa yang dihasilkan akan bermanfaat bagi kepentingan rakyat itu sendiri.

Asas yang digunakan adalah kegotong-royongan, kekeluargaan, kerakyatan, dan kebersamaan. Metode saling-asuh dan saling-asah merupakan wahana interaksi komunikasi antara ABRI dan Rakyat dalam pelaksanaan program ini. Metode ini diarahkan untuk saling mengenal, saling percaya mempercayai, saling memiliki dan saling mencintai sehingga timbul rasa kebersamaan, senasib sepenanggungan, satunya kata dengan perbuatan antara ABRI dan Rakyat dalam mengisi

Kemerdekaan, menegakkan Kemerdekaan, dan memberla bangsa dan Negara NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam ketentuan umum penyelenggaraan “Manunggal 1983-1984”, disebutkan bahwa seluruh penyelenggaraan Rencana Umum TNI-ABRI Masuk Desa 1983-1984 disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan serta kebijaksanaan dari Menhankam/Pangab. Departemen yang terlibat yakni Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Perindustrian, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen P & K, Departemen Penerangan, Departemen Agama, dan Departmen Pertambangan dan Energi.

Dasar keikutsertaan unsur-unsur departemen di luar Hankam adalah untuk menunjukkan kondisi keterpaduan program dan kesinambungan program pembangunan pedesaan.

Di tingkat Departemen Dalam Negeri, beberapa Direktorat yang terlibat adalah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, serta Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah.

Di tingkat Departemen Pekerjaan Umum, hanya Direktorat Jenderal Cipta Karya yang terlibat.

Selanjutnya, di Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular ikut terlibat.

Di Departemen Sosial, terdapat tiga Ditjen yang terlibat, yaitu Direktorat Jenderal Bina Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, dan Direktorat Bantuan Sosial. Selanjutnya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen yang terlibat ialah Ditjen Pendidikan Dasar, Ditjen Pendidikan/Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, Menteri Muda Urusan Pemuda.

Di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang terlibat adalah Ditjen Bina Guna dan Ditjen Transmigrasi. Di Departemen Penerangan, Ditjen yang terlibat adalah Ditjen Penerangan Umum dan Ditjen RFTV.

Lalu di Departemen Pertanian Ditjen Ketahanan dan Ditjen Perikanan menjadi pihak yang turut mengambil peranan. Sedangkan di

Departemen Ketenagaan, Listrik dan Energi, pihak yang terlibat adalah Perusahaan Listrik Negara.

Lewat pelaksanaan program TNI-ABRI Masuk Desa, kita dapat melihat bahwa kerja sama sipil-militer dalam rangka pembangunan NKRI dapat terwujud lewat adanya kemandirian TNI-ABRI dan rakyat dalam melaksanakan program-program pemerintah. Hal ini dapat menggambarkan betapa pentingnya kolaborasi antara TNI dan rakyat, termasuk beberapa departemen yang terlibat dalam mengilustrasikan kerja sama sipil-militer kala itu (Dephankam, 1983.).

4.4. Sipil-Militer di Era Reformasi

Di era reformasi, perubahan serta transformasi kembali dirasakan dalam jalinan relasi serta kerja sama sipil-militer Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan paradigma baru serta peranan TNI di dalamnya. Ketika reformasi bergulir, TNI memiliki paradigma baru yang karakteristiknya jauh berbeda dengan jalan tengah milik Nasution.

Paradigma baru ini menempatkan posisi militer tanpa mendominasi hal-hal terkait sosial dan politik dalam kerja samanya dengan sipil. Paradigma baru yang dipergunakan TNI dalam melakukan reformasi adalah dengan melakukan perubahan yang rasional dan sistematis. TNI juga melakukan koreksi perbaikan, menghilangkan hal-hal buruk yang merusak citra, dan melakukan terobosan terukur yang produktif. Selain itu, Paradigma baru TNI ini juga memberikan penekanan pada posisi militer di Indonesia serta memperkuat kesatuan TNI melalui reformasi internal TNI.

Makna dari reformasi sendiri adalah perubahan, meningkatkan yang sudah dan memperbaiki yang belum, yang mentransformasikan suatu sistem yang dulunya otoriter menuju demokratis. Dengan perubahan sistem tersebut, TNI diminta untuk memposisikan diri dalam suatu tatanan yang disebut dengan paradigma baru TNI. Era yang baru ini menuntut prajurit TNI aktif untuk tidak lagi bermain di ranah politik praktis.

Dalam hal ini TNI, harus menjaga pengertian reformasi di bidang pertahanan negara maupun TNI, bahwa perubahan ini tidak diartikan sebagai suatu revolusi, namun merupakan suatu perubahan rasional yang dilakukan secara bertahap dalam upaya menghilangkan yang buruk dan memperbaiki yang kurang. Artinya, berjalannya reformasi, harus dilaksanakan secara gradual, sistematis, tidak dengan melakukan perombakan secara total.

Dari sisi manfaat, reformasi bagi TNI harus dilihat dari sisi introspeksi dan antisipasi, dengan istilah lain “mawas diri dan waspada”. Introspeksi diri dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan tugas tidak ada lagi pelaksanaan tugas yang berjalan secara otomatis. Semua pelaksanaan tugas TNI harus berdasarkan legalitas dan legitimasi sesuai dengan pengaturan konstitusi.

Bagi TNI, reformasi tidak dilakukan secara drastis, tidak revolusioner, namun lebih seperti evolusi. Era reformasi telah menyediakan lebih banyak waktu bagi TNI untuk membenahi dan menata diri serta menambah bobot intelektual bagi prajuritnya.

Tuntutan reformasi juga sejalan dengan tuntutan yang dibawa oleh arus globalisasi, yang telah mendorong perjumpangan lebih tinggi hak-hak sipil dalam kerangka penghormatan dan pelaksanaan Hak Azasi Manusia (HAM) (Sundari, 2017).

Karena itulah, para prajurit TNI dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa dan negara. Ini adalah hal yang diperlukan untuk memenuhi perkembangan dan tuntutan demokrasi di Indonesia. TNI bertekad bangkit dan mengubah sikap dengan menjalani reformasi internal. TNI berkomitmen untuk secara proporsional dan profesional memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional.

Yang tak kalah penting, reformasi juga telah memberikan kontribusi dalam pengembangan *civil society* dan demokratisasi tanpa harus merubah jati diri TNI. Namun, jangan sampai kita keliru bahwa prinsip mempertahankan jati diri ini berarti TNI melaksanakan *status quo*, alias tidak berubah atau tidak berkembang. Dalam hal ini, pihak militer telah mendapatkan waktu dan kesempatan untuk ‘berbenah’. Di

era reformasi, TNI dapat menata diri serta mengembangkan bobot intelektual prajuritnya.

Karenanya, reformasi lebih baik dikatakan sebagai perkembangan profesionalisme militer, yang mengarah kepada bagaimana militer beradaptasi dengan perubahan dunia, dan yang dilakukan oleh TNI adalah perubahan implementasi secara rasional yang dipandang lebih produktif. dengan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pertahanan.

Di masa ini pula, sipil dan militer menjalankan kerja sama untuk membangun *civil society*. Satu hal yang perlu diingat, TNI tidaklah berbeda dengan sipil. TNI adalah warga negara Indonesia, yang kebetulan bekerja sebagai profesi militer.

Dalam rangka menuju tatanan Indonesia baru, rekonstruksi pemikiran hubungan sipil-militer dirumuskan dengan mengedepankan kekuasaan hukum dalam penyelenggaraan negara, yang meliputi: 1) Sipil memberi arah kebijakan, namun tidak mencampuri masalah operasional maupun manajemen internal tentara. 2) Hubungan sipil-militer hendaknya dilandasi nilai moral dan sikap mental yang baik dengan saling menghargai, saling percaya, dan mempunyai kehendak kuat untuk bekerja sama. 3) Prinsip kesetaraan, kedekatan, dan kerja sama, tidak ada hubungan dikotomi, tetapi interaksi sinergis dan strategis (Santoso *et al.*, 2014).

Dalam buku pedoman 'Paradigma Baru Peran TNI (Sebuah Upaya Sosialisasi)' (1999) pun disebutkan bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi faktor yang dominan dan determinan sebagai kekuatan dahsyat untuk menangkal setiap ancaman yang timbul. Dalam rangka menyukseskan reformasi, TNI sebagai tulang punggung negara harus mengakar pada rakyat sebagai sesuai jati diri prajurit pejuang, prajurit rakyat, dan tentara nasional.

Mengenai komando teritorial, harus disadari bahwa fungsi teritorial bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, tetapi juga pemerintah. Sebagai sebuah organisasi, TNI melakukan pembinaan teritorial, tetapi hanya bagian kecil dari keseluruhan pembinaan teritorial pemerintah.

Jadi, pembinaan teritorial itu dilaksanakan oleh semua aparat negara, pemerintah, untuk menjaga kelangsungan hidup negara terhadap berbagai kemungkinan gangguan keamanan.

Komando Teritorial TNI dilakukan dalam bentuk penggelaran kekuatan TNI sebagai alat pertahanan negara. Apabila dianggap perlu, maka TNI dapat melakukan penggelaran operasi kemanusiaan atau untuk membantu pemerintah daerah.

Puncak dari perubahan legalitas dan legitimasi TNI yang baru di era demokrasi merujuk kepada UU TNI No 34 tahun 2004. UU tersebut menegaskan dua tugas pokok yang diamanatkan kepada TNI. Yang pertama Operasi Militer Perang (OMP) dan yang kedua adalah Operasi Militer selain Perang (OMSP).

Tidak berlebihan jika dibilang tugas OMSP yang diberikan kepada TNI menjadi poin penting yang perlu disoroti dalam kerja sama sipil-militer di era reformasi. Pelaksanaan OMSP yang diatur dalam 7 Ayat 2b UU TNI menyebutkan bahwa tugas TNI adalah melaksanakan bantuan dalam hal-hal terkait operasi militer selain perang, seperti menanggulangi bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 10 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa TNI dapat melaksanakan OMSP seperti bantuan kemanusiaan, perbantuan kepada Polri dalam keamanan dan ketertiban nasional, bantuan kepada pemerintahan sipil, pengamanan pelayaran dan penerbangan, bantuan *search and rescue*, serta penanggulangan bencana.

Setiap aksi OMSP yang dilakukan oleh TNI harus melibatkan komponen sipil dan dilaksanakan dilaksanakan saat TNI menerima permintaan dan/atau lewat peraturan perundangan dengan pemberian bantuan, dukungan, serta kemitraan instansi lintas sektoral atau non TNI atau sipil. Lewat OMSP inilah, akan terwujud pertahanan nirmiliter sebagai bentuk kerja sama sipil dan militer.

Terdapatnya OMSP sebagai tugas TNI sangatlah relevan dengan situasi di era reformasi, seiring dengan munculnya ancaman terhadap bangsa Indonesia yang tidak hanya berupa ancaman militer, namun juga ancaman non militer. Ancaman-ancaman tersebut perlu dihadapi

dengan kerja sama antara sipil dan militer dalam kerangka sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.

Secara singkat, OMSP menegaskan posisi TNI sebagai komponen utama, sipil sebagai komponen cadangan, serta sumber daya bangsa sebagai komponen pendukung. Contoh konkrit pelaksanaan OMSP dapat dilihat melalui operasi balas budi serta tugas-tugas rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan TNI di daerah-daerah bekas pertempuran.

Bentuk kerja sama sipil-militer ini juga menunjukkan bahwa militer di masa kini tidak sekadar hadir untuk melindungi keamanan negara dari ancaman tradisional, tetapi juga bertugas untuk hal-hal yang terkait erat dengan sipil, mulai dari mendukung perdamaian hingga membantu mengurangi penderitaan masyarakat yang terkena musibah bencana.

Untuk menjunjung semangat reformasi di Indonesia, tentunya semua komponen bangsa perlu bertanggung jawab dalam hal penegakan HAM demi terciptanya stabilitas dan penegakan hukum yang lebih berwibawa dan adil.

Jika dilihat dari sudut pandang ini, kita bisa mengatakan bahwa tuntutan yang dibawa oleh era reformasi tidak hanya relevan untuk mewujudkan demokratisasi dan HAM, namun juga membuka lembaran baru dalam kerja sama sipil-militer, mengizinkan kerja sama yang sejajar dan harmonis di antara kedua belah pihak (Tim Penyusun Buku Hubungan-Sipil Militer, 1999).

Perubahan ini mengizinkan kerja sama sipil-militer untuk berkembang ke arah yang lebih positif, yang selama ini telah terlaksana dan dapat kita lihat contohnya hingga sekarang lewat pembahasan kita selanjutnya.

4.5. Pelaksanaan Kerja sama Sipil-Militer dalam Berbagai Bidang di Era Demokrasi

Era demokrasi tak hanya mengizinkan pelaksanaan kerja sama sipil-militer yang telah berlangsung di masa lalu untuk dilanjutkan menuju arah yang lebih baik, namun juga mendukung perluasan kerja sama sipil-militer dalam berbagai bidang.

Sebelumnya, kita sudah membahas tentang program ABRI Masuk Desa yang dilaksanakan di masa lalu. Di masa kini, program tersebut berlanjut dengan nama TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dalam laporan berjudul 'Optimalisasi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah', disebutkan bahwa lewat program terpadu ini, TNI melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah, dengan harapan kesejahteraan masyarakat di daerah juga akan meningkat.

Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, TMMD juga bertujuan untuk pembinaan keamanan wilayah. Pelaksanaan TMMD tidak terlepas dari fakta bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena secara umum masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan dan sebagian besar tinggal di daerah pedesaan.

Lebih lanjut, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa merupakan bagian dari Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan untuk pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta serta untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, TNI Manunggal Membangun Desa melakukan berbagai upaya yang meliputi pembangunan fisik, seperti TNI Manunggal Pertanian pembangunan bendungan air atau waduk, peningkatan kualitas sarana transportasi, hingga pembangunan sarana kesehatan.

Pembangunan non fisik juga menjadi bagian dari pelaksanaan. Lewat pembangunan non-fisik, TNI melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya penggalakan Pos Kamling. Lewat kegiatan ini, diharapkan masyarakat memiliki kemampuan untuk mencegah ataupun menangkal segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang mungkin timbul.

Dengan adanya kemampuan masyarakat untuk menangkal segala ancaman yang akan timbul sudah pasti masyarakat akan mampu meningkatkan kesejahteraannya dan dapat menciptakan rasa aman

untuk dirinya sendiri. Dengan rasa aman yang dimiliki maka masyarakat akan tenang dalam melakukan berbagai aktivitas, terutama dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Selain itu, upaya non-fisik juga dilakukan lewat pelatihan singkat untuk mengolah lahan pertanian, pemasaran hasil pertanian, penyuluhan program KB, dan bimbingan untuk hidup sehat dan bersih.

Tak hanya melalui penyelenggaraan TMMD, Kerja sama sipil-militer di masa kini pun terus berlanjut dan bahkan sukses melebarkan sayapnya ke berbagai sektor dan bidang. Salah satunya adalah bidang olahraga, tepatnya pada saat penyelenggaraan Asian Games pada tahun 2018 lalu.

Saat itu, sebuah terobosan terwujud dengan memasukkan sejumlah purnawirawan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke susunan penyelenggara Asian Games XVIII tahun 2018 di Jakarta dan Palembang.

Penyusunan panitia ini bukannya tanpa alasan. Dengan pengalaman kepemimpinan yang dimiliki para purnawirawan di militer, kerja sama ini berhasil menyukseskan penyelenggaraan pesta olahraga se-Benua Asia itu. Ini adalah sebuah contoh bagaimana sipil dan militer Indonesia dapat bersama-sama membangun negara

Tak dapat dipungkiri, kerja sama sipil-militer berkontribusi besar pada kesuksesan penyelenggaraan event tersebut. Pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan TNI mendapat apresiasi dari banyak pihak karena telah membuktikan keamanan Indonesia di mata internasional dengan pelaksanaan Asian Games yang berlangsung tanpa ada terorisme, kabut asap, dan kerusuhan.

Kita pun tidak dapat melewatkan kerja sama sipil-militer dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Hampir tiga tahun berlalu sejak virus Corona melanda di Indonesia, kengerian yang ditimbulkan akibat wabah pandemi ini masih melekat di ingatan banyak orang. Pada waktu itu, kehidupan banyak orang diliputi dengan ketidakpastian sebagai dampaknya.

Boleh dibilang, Pemerintah pun sempat kewalahan dalam menyikapi COVID-19. Hal tersebut terlihat dari kegamangan dalam menetapkan Kementerian dan Lembaga yang berwenang dalam

penanganan COVID-19 serta kerap bergantinya Inpres terkait COVID-19.

Di sini, kerja sama sipil-militer kembali memasuki babak barunya. Dengan berlanjutnya penyebaran COVID-19, kerja sama sipil militer dilaksanakan untuk menegakkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan oleh semua pihak.

Maka itulah, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 pada bulan Agustus 2020 lalu. Lewat Inpres tersebut, Polri ditugaskan untuk bersinergi dengan TNI dan Pemda dalam melakukan patroli.

Pandemi yang berlangsung di Indonesia saat itu menuntut seluruh pihak untuk saling bahu membahu dan bekerja sama dalam penanganannya. Maka itu, penurunan militer dalam penanganan pandemi menurutnya adalah hal yang dibutuhkan, dan di saat yang bersamaan, peran sipil pun tidak bisa disingkirkan dalam penanganan pandemi, khususnya bagi hal-hal seperti perawatan pasien.

4.6. Kerja Sama Sipil-Militer dalam Pengembangan Industri Pertahanan

Salah satu bidang yang perlu disoroti secara khusus ketika membahas pelaksanaan kerja sama sipil-militer Indonesia di masa kini adalah kerja sama dalam pengembangan industri pertahanan.

Memiliki pertahanan yang tangguh adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap bangsa. Kemampuan pertahanan tidak Cuma penting dalam menjaga keselamatan bangsa, namun juga merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, maupun kepentingan nasional.

Efektivitas pertahanan negara turut ditentukan oleh kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) secara mandiri. Oleh sebab itu, industri pertahanan perlu dibangun melalui revitalisasi industri pertahanan guna meningkatkan efektifitas pertahanan negara.

Terlebih lagi, kemampuan angkatan perang sangat dipengaruhi oleh kekuatan industri pertahanan yang mendukungnya. Kita dapat

melihat, bahwa tidak ada satu negara pun yang tidak memperkuat angkatan perangnya. Bahkan banyak negara yang memperkuat industri pertahanannya agar angkatan perangnya menjadi andal, karena kebutuhannya dipenuhi secara mandiri melalui industri pertahanan dalam negeri.

Angkatan perang yang andal juga harus didukung dengan peralatan yang modern dan mandiri. Maka itulah, kita membutuhkan peralatan tempur yang modern dan mandiri untuk memperkuat angkatan perang kita. Dengan adanya urgensi tersebut, hal ini memosisikan industri pertahanan sebagai salah satu faktor determinan bagi kelangsungan sistem pertahanan negara.

Dalam membangun angkatan perang yang andal, kita tidak hanya harus memiliki prajurit yang profesional, tapi harus pula dipersenjatai dengan alutsista yang modern dan dapat diandalkan.

Sekali lagi, hal ini hanya bisa terwujud apabila kita didukung oleh industri pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan alutsista secara mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, kerja sama sipil-militer pada era demokrasi turut diperluas lewat keterlibatan para ahli sipil dalam pengembangan Industri Pertahanan.

Bagaimana sipil dapat terlibat dalam pengembangan industri pertahanan di era demokrasi? Hal tersebut berawal dari diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara mengenai pengembangan industri pertahanan pada masa awal reformasi. Dalam UU ini, Kementerian Pertahanan (Kemhan) diatur sebagai pihak yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan pengembangan industri pertahanan.

Sebagai pembina industri pertahanan, Kemhan punya tugas untuk membuka peluang kepada industri pertahanan di dalam negeri untuk memasok kebutuhan. Selain itu, Kemhan juga mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk bisa melakukan ekspor produk mereka ke luar negeri.

Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa Industri Pertahanan adalah komponen pendukung dari sistem pertahanan kita, yang melengkapi TNI sebagai komponen utama dan masyarakat yang menjadi komponen cadangan.

Dengan peranannya tersebut, efektivitas pertahanan negara turut ditentukan oleh kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan peralatan militer TNI. Singkatnya, kita perlu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan peralatan militer secara mandiri lewat industri pertahanan. Dan di sinilah, kerja sama di antara sipil dan militer dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan.

Setelah revitalisasi industri pertahanan yang diarahkan pada tahun 2004, mesin kerja dari semua pemangku kebijakan pun segera bergerak, di mana Kementerian Pertahanan berperan sebagai pembuat regulasi dan kebijakan industri pertahanan, TNI berperan sebagai pengguna, dan tak ketinggalan, para pelaku industrialis pertahanan berperan sebagai produsen.

Semua elemen dalam negeri tersebut menyatu untuk mewujudkan satu target, yaitu melakukan revitalisasi industri pertahanan untuk membangkitkan kekuatan industri dalam negeri.

Strategi revitalisasi industri pertahanan ini juga diatur dalam tiga pilar. Yang pertama, mewajibkan pengguna dalam negeri menggunakan produksi dalam negeri untuk kebutuhan alutsista dan non-alutsista. Hal ini berlaku baik bagi TNI maupun Polri, serta instansi pemerintah sipil.

Kedua, jika memang harus membeli dari luar negeri, maka harus memenuhi syarat bahwa produksi dalam negeri memang belum mampu memenuhi spesifikasi teknis dan operasional dari pengguna yang perlu teknologi tinggi.

Yang menjadi catatan, pembelian dari luar negeri harus ditambah persyaratan perlunya ToT (*Transfer of Technology*) dan offset dari negara pemasok kepada industri pertahanan dalam negeri, yang bisa dilakukan lewat joint production, atau bila perlu melalui joint investment.

Yang ketiga, pembelian dari luar negeri tidak boleh mendikte secara politik terhadap negara dalam membeli peralatan militer. Dengan strategi tersebut, Indonesia sebenarnya pun memiliki visi, misi, dan grand strategy untuk pembangunan industri pertahanan.

Pada perkembangannya, berbagai perusahaan BUMN yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN juga menjalankan kerja sama yang

solid dengan Kementerian Pertahanan dalam rangka memajukan industri pertahanan.

Selain bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan TNI, Kemhan juga melakukan upaya mendorong ekspor produk-produk pistol, senjata serbu, mortir dan kendaraan tempur roda ban (Panser Anoa) dari PT Pindad. Alutsista darat buatan PT Pindad tersebut telah memenuhi standar PBB dan sukses sudah mendukung kebutuhan TNI-AD. Saat ini sedang dilakukan retrofit kendaraan tempur roda rantai (Tank AMX-13) yang merupakan awal membangun tank ringan. Dengan perkembangan yang signifikan tersebut, diharapkan ke depannya industri pertahanan kita bisa membuat sendiri tank ringan sampai berat.

Sementara itu, PT PAL menjadi BUMN yang diberikan peran untuk alutsista laut. Selain diandalkan untuk pembuatan kapal perang skala besar seperti kelas korvet dan kapal selam, PT PAL juga didorong untuk membuat kapal perang untuk tanker. Yang menarik, PT PAL mulai merekrut tenaga terampil berumur 18-20 tahun untuk pembangunan kapal selam mandiri.

Untuk alutsista udara, PT Dirgantara Indonesia menjadi perusahaan BUMN yang diberi tugas untuk membangun pesawat angkut sedang CN 295 lewat joint production dengan Airbus Military. Lewat produksi pesawat angkut ringan ringan seperti C-212 sampai CN 235 dan CN 295 yang bermuatan 50 penerjun serta pembuatan helikopter serbu Bell- 412 dan heli Cougar 725, PT.Dirgantara Indonesia diharapkan bisa memenuhi sebagian kebutuhan dari TNI dengan alutsista yang cocok untuk operasi kemanusiaan.

Lalu, terdapat juga PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. Dua BUMN ini diberi tugas untuk membangun Landing Ship Tank atau kapal pengangkut tank ringan dan sedang oleh Kemhan. Tak hanya itu, industri pertahanan swasta juga telah memberikan kontribusi besar untuk kapal patroli cepat berukuran 60 meter ke bawah seperti Palindo, Lundin, Anugrah.

Kerja sama di antara berbagai Kementerian dan Lembaga lewat industri pertahanan tersebut merupakan sebuah contoh nyata dari pelaksanaan kerja sama sipil-militer Indonesia yang solid di era

demokrasi ini. Berkat kerja sama inilah, kita kini boleh berbangga mengetahui bahwa industri pertahanan kita telah memasuki tingkat kemampuan teknologi menengah dan bergerak ke arah teknologi militer pada skala tinggi.

Pada tahun 2012, pemerintah dan DPR juga menetapkan UU No. 16 tentang Industri Pertahanan sebagai legalisasi dan legitimasi menghidupkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Dengan menggunakan perangkat pengaturan yang tegas dan jelas serta wujud pembangunan sistem industri yang sistematis dan terorganisasi, pemberdayaan segenap kemampuan industri nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dapat ditingkatkan dan menjadi lebih efektif dan efisien. Undang-Undang Industri Pertahanan dalam hal ini menjadi landasan hukum dalam mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Perkembangan industri pertahanan Indonesia juga disertai dengan alokasi anggaran untuk industri pertahanan yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan tingginya atensi pemerintah dalam memberikan good will dan political will dalam memenuhi kebutuhan alutsista melalui pemberdayaan industri pertahanan.

Lewat kemandirian pemenuhan kebutuhan alutsista ini, industri pertahanan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro dengan meningkatkan lapangan kerja, mengurangi pengangguran serta menghemat devisa, yang tak hanya memberi manfaat bagi militer, namun juga sipil.

Industri pertahanan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara merupakan faktor determinan yang perlu terus dikembangkan sesuai dinamika perubahan strategis.

Dengan adanya kerja sama sipil-militer, masa depan industri pertahanan Indonesia memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Bahkan, tak menutup kemungkinan bagi Indonesia untuk meraih berbagai capaian seperti pengembangan

teknologi robot, pesawat tak berawak, kapal tak berawak, roket dan rudal, pembuatan satelit mikro, kendaraan lapis baja, kapal perang dan pesawat. Hal-hal tersebut menjadi peluang yang perlu dikembangkan lewat kerja sama sipil-militer dalam industri pertahanan di masa mendatang.

Bahkan jika kita ingin melihat lebih jauh, pembangunan industri pertahanan di masa depan perlu terus dikembangkan juga pada kemampuan lain yang sesuai dengan dinamika global. Contohnya adalah rekayasa perangkat lunak untuk keperluan-keperluan sistem yang berorientasi pada perangkat lunak (*software-based system*) seperti simulator, *artificial intelligence*, dan robot.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan asimetris, kerja sama sipil-militer dalam industri pertahanan juga dapat dikembangkan ke bidang *cyber* untuk kebutuhan informasi dan komunikasi, khususnya kemampuan *intelligence, surveillance and recognition (ISR)*.

Yang tak kalah penting, industri pertahanan juga harus mampu mengakomodasi pencapaian-pencapaian teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya yang dimiliki oleh para anak bangsa. Dengan kebijakan pemerintah dan alokasi anggaran yang meningkat setiap tahunnya untuk industri pertahanan, pengembangan dan peningkatan kemampuan industri pertahanan perlu ditransfer menjadi sebuah kapabilitas pertahanan yang lebih mumpuni dan lebih andal pada masa datang.

Tak dapat dipungkiri, kita memang masih menghadapi tantangan—namun juga peluang—untuk mewujudkan berbagai tujuan dan cita-cita ini, misalnya dalam hal meningkatkan kualitas manajemen yang profesional dan kompetitif. Kualitas manajemen ini dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan kualitas, waktu distribusi, dan harga yang bersaing. Tanpa ada profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan dan keuangan, semua peluang yang ada ini tidak akan bisa dimanfaatkan bahkan terlewat tanpa makna. Tantangan ini merupakan cambuk untuk meraih kapasitas produksi yang maksimal.

Karenanya, industri pertahanan dalam pengembangannya juga perlu memperhatikan aspek institusional, industrial, legal dan personal

atau sumber daya manusia, sehingga arah pengembangan industri pertahanan dapat lebih fokus dan sesuai dengan kultur Indonesia.

Dengan industri teknologi pertahanan yang mandiri disertai dengan kerja sama sipil-militer yang solid, seluruh pihak dapat mendukung misi negara dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Dengan begitu, industri pertahanan kita tidak perlu lagi tergantung kepada negara lain karena bangsa kita sendiri mampu memenuhi kebutuhan bagi angkatan perangnya.

Maka itulah, ke depannya semangat, niat, dan tekad untuk membangkitkan industri pertahanan kita harus didukung militansi dan intelektualisasi dari teknokrat kita, baik sipil dan militer, yang juga disertai dengan *political will* yang konsisten dan berkelanjutan dari negara.

BAB V
IMPLEMENTASI
SISHANKAMRATA DALAM
KERJA SAMA SIPIL-MILITER

Bab 5

Implementasi Sishankamrata dalam Kerja Sama Sipil-Militer

Melalui pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kita mengetahui bahwa pelaksanaan kerja sama sipil-militer merupakan wujud dari penerapan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Pelaksanaan Sishankamrata sendiri merupakan pelaksanaan dari Sistem Pertahanan Indonesia yang bersifat semesta, yang mengacu kepada Amanat UUD 1945 Pasal 30. Dalam amanat tersebut, disebutkan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI. Lebih lanjut, sistem Pertahanan Negara dibangun dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani baik oleh kawan maupun lawan

Sistem Pertahanan Semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem Pertahanan Semesta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani baik kawan maupun calon lawan. Dipersiapkan secara dini berarti Sistem Pertahanan Semesta dibangun secara terus-menerus sejak masa damai sampai masa perang (Sjamsoeddin, 2016).

Secara singkat, Sundari (2017) mendeskripsikan Sishankamrata sebagai suatu kewajiban bagi Bangsa Indonesia dalam melengkapi kekuatan utama yang dimiliki dengan kekuatan cadangan guna mempertahankan eksistensi dan kedaulatannya.

Penjelasan mengenai Sishankamrata di atas kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana konsep Sishankamrata ini diterapkan dalam pelaksanaan Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bab ini akan membahas dan mendalami tentang Sishankamrata serta penerapannya dalam perwujudan Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia

5.1. Implementasi Sishankamrata

Pelaksanaan kerja sama sipil-militer Indonesia sebagai bentuk penerapan Sishankamrata sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari Undang Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan kepada negara untuk menjamin rasa aman dan keamanan bagi warga negara. Tujuan dari Undang Undang Dasar 1945 adalah melindungi NKRI dengan segala isinya yang menyiratkan bahwa keamanan dan rasa aman adalah kebutuhan utama bangsa dan negara sejajar dengan kebutuhan kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Dalam Undang Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa sistem usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

Esensi dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tersebut mengungkapkan tujuannya dengan jelas dan tegas. Sehingga, UUD 1945 merupakan landasan dari pelaksanaan Sishankamrata, termasuk juga yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Kerja Sama Sipil-Militer.

Sishankamrata sebagai sebuah fondasi perjuangan merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan pertahanan negara, dan hal tersebut turut ditegaskan lewat UUD 1945, tepatnya melalui Pasal 27 dan Pasal 30 yang mengatur tentang Upaya Bela Negara.

Kedua pasal tersebut berisi hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dengan menerapkan konsep Sishankamrata, di mana pasal 27 Ayat 3 berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.”

Sementara itu Bab XII Pasal 30 yang berisi tentang pertahanan dan keamanan negara, tepatnya Ayat (1) berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara", yang berlanjut ke Pasal 30 Ayat 2 yang berbunyi "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung."

Pasal-pasal tersebut menjadi refleksi atas prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta membela negara dengan berpartisipasi aktif dalam upaya penyelenggaraan pertahanan dan keamanan, yaitu mempertahankan dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam pasal-pasal tersebut, terdapat pula makna tersirat mengenai kerja sama sipil-militer yang pelaksanaannya harus ditujukan bagi terwujudnya kekuatan pertahanan untuk menopang Sishankamrata.

Kini, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan diterjemahkan dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang ditetapkan setiap periodenya.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), memiliki tiga pilar utama, yaitu TNI selaku angkatan bersenjata Indonesia sebagai Komponen Utama, Sipil sebagai Komponen Cadangan, dan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana yang dimiliki Indonesia sebagai Komponen Pendukung.

Seperti yang dikatakan oleh tokoh militer Oerip Soemohardjo, "Tentara Indonesia adalah Rakyat Indonesia." Artinya, Indonesia memiliki 250 juta tentara dengan TNI sebagai kekuatan inti (Sjamsuoddin, 2016).

Dalam menghadapi ancaman militer, penerapan Sishankamrata memiliki sifat defensif aktif, yang secara sederhana dapat diartikan memiliki tujuan bertahan secara aktif dari ancaman militer negara lain,

dan bukan untuk tujuan agresif atau ekspansif alias menyerang, sejauh kepentingan nasional tidak terancam.

Nilai-nilai dasar dari Hankamrata yang menjadi ciri dari Sishankamrata turut diamanatkan dalam konsitusi dan pada perkembangannya telah dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Misalnya di UU No. 23 tahun 2019, diatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara yang menjelaskan peran Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung yang pada akhirnya akan dilaksanakan pembinaan oleh komando teritorial.

Dengan diberlakukannya landasan konstitusi di atas, maka dapat dipahami bahwa sistem pertahanan Indonesia punya keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, warga negara turut dilibatkan dalam pelaksanaan pertahanan negara sebagai bagian dari hak dan kewajiban warga negara.

Pelibatan warga negara tersebut salah satunya ditunjukkan lewat kerja sama sipil-militer yang berlangsung hingga saat ini. Karena itulah, konsep Sishankamrata terus bertahan menjadi sebuah keyakinan yang diterapkan oleh Bangsa Indonesia dalam pelaksanaan kerja sama sipil-militer.

Dalam upaya mencapai tujuan nasional, pemerintah perlu dan wajib untuk melakukan berbagai usaha yang dituangkan dalam kegiatan pembangunan nasional agar terjadi perubahan ke arah kemajuan yang lebih baik, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat dan bangsa.

Pembangunan nasional menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara.

Oleh karena itu, negara memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak untuk berperan serta dalam proses pembangunan nasional. Peranan ini bisa dilakukan lewat pelaksanaan fungsi yang menjamin terwujudnya kondisi kesejahteraan masyarakat secara

nasional, maupun pelaksanaan fungsi yang menjamin terwujudnya kondisi keamanan nasional yang stabil dan kondusif, di mana keduanya dapat dilakukan lewat Kerja Sama Sipil-Militer yang didasari atas keyakinan akan Sishankamrata.

5.2. Dari Keyakinan Implementasi Sishankamrata

Bagi Bangsa Indonesia, Sishankamrata merupakan sebuah bentuk keyakinan yang terpratri dalam rangka mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta kedaulatan NKRI. Keyakinan tersebut menjadi landasan dari pelaksanaan kerja sama sipil-militer sejak masa lampau, yang telah kita lihat lewat refleksi sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Saat itu, selain sinergitas sipil-militer pada tataran elit—yaitu antara Panglima Besar Jendral Soedirman dengan tataran operasional di lapangan—juga terwujud kerja sama sipil-militer dengan rakyat, di mana Panglima Besar Jenderal Soedirman memimpin perlawanan bersenjata yang dikenal dengan nama perang gerilya.

Perang gerilya merupakan embrio dari konsep Sishankamrata, yang diwujudkan lewat sinergi dari militer (kekuatan bersenjata) dengan masyarakat (kekuatan sipil). Maka itulah, pelaksanaan perang gerilya yang tidak dapat dipisahkan dari bantuan rakyat menjadi embrio dari sistem pertahanan rakyat yang berangkat dari keyakinan akan Sishankamrata.

Pola Sishankamrata menjelaskan implementasi perang berlarut, di mana komando teritorial perlu diperkuat dan diwujudkan dengan dukungan logistik tempur hingga lumbung pangan yang berasal dari rakyat. Di sini, para warga desa tak hanya menampung para pengungsi, namun juga membantu pasukan militer untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Bantuan rakyat tersebut menghasilkan suatu komponen yang dipadukan dengan tentara, sehingga komponen-komponen itu berkembang menjadi sistem pertahanan rakyat yang kuat. Bantuan inilah yang menjadi esensi perwujudan dari kerja sama sipil-militer di

masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa.

Sistem pertahanan ini sebenarnya sempat dianggap sepele oleh Belanda. Kala itu, pasukan Belanda memiliki pola pikir yang terlalu konvensional dan kurang memperhitungkan kuatnya taktik gerilya yang digalang lewat kerja sama sipil-militer Indonesia. Pada akhirnya, kelemahan Belanda tersebutlah yang memberi celah bagi Indonesia untuk meraih kemenangan. Dengan terus menerapkan sistem pertahanan rakyat, TNI dapat merebut dan memelihara inisiatif dalam perlawanan gerilyanya, hingga tumbuh makin kuat dan tidak mudah dihancurkan (Soetanto, 2006).

Nilai-nilai dasar dalam penerapan pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang terdiri nilai kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan, yang bersumber dari nilai-nilai perjuangan seperti cinta tanah air, rela berkorban, tidak kenal menyerah, gotong royong, dan percaya pada kekuatan sendiri pada akhirnya mengantarkan Indonesia menuju keberhasilan dalam mempertahankan kedaulatannya.

Berkat nilai-nilai yang didasari atas keyakinan akan Sishankamrata tersebutlah, para pejuang militer serta sipil dapat mengatasi berbagai ancaman terhadap eksistensi dan kelangsungan hidup NKRI. Eksistensi kerja sama sipil-militer pun tak luput dari pelaksanaan konsep Sishankamrata tersebut, yang ke depannya perlu terus diterapkan dan dilanjutkan dalam menjunjung persatuan dan kesatuan NKRI.

Kerja sama sipil-militer di bidang pertahanan dengan konsep Siskamhanrata yang terjadi dalam sejarah adalah dasar pijakan yang tetap harus menjadi pedoman dalam membangun usaha pertahanan negara.

5.3. Model Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia di Masa Depan

Kita telah membahas tentang landasan dari Sishankamrata, serta bagaimana keyakinan akan Sishankamrata diterapkan dalam kerja

sama sipil-militer di zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Konsep Sishankamrata dapat diterapkan dalam kerja sama sipil-militer Indonesia di era demokrasi dan globalisasi yang serba modern ini? Apa yang membedakan penerapan konsep Sishankamrata dalam kerja sama sipil-militer Indonesia di masa kini dengan masa lalu?

Untuk lebih memahami perkembangan tersebut, kita dapat kembali melihat pelaksanaan kerja sama sipil-militer dari perspektif sejarah, mulai dari era mempertahankan kemerdekaan, pasca revolusi, yang pada akhirnya mengantarkan pada pelaksanaan kerja sama sipil-militer di era reformasi saat ini.

Pada dasarnya, keyakinan akan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta merupakan suatu ajaran yang digali dari nilai-nilai dasar perjuangan bangsa kita di masa lalu dan. Di masa kini, keyakinan tersebut terus menjadi pedoman bagi pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.

Hingga saat ini, model pertahanan negara Indonesia juga tetap menggunakan konsep Sishankamrata yang melibatkan seluruh warga negara sebagai salah satu kekuatan pertahanan negara. Penerapan konsep Sishankamrata ini juga berkaitan dengan kondisi negara serta nilai-nilai historis yang dimiliki bangsa kita.

Di masa kini, pertahanan diatur dalam Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur tentang Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (2). Saat membahas penerapannya di masa kini, kita juga tidak melupakan fakta bahwa Pertahanan Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, yang dibentuk untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman nirmiliter.

Hal yang menonjol dalam pertahanan nirmiliter adalah peran rakyat sebagai sumber daya manusia dalam bela negara. Peran rakyat tersebut, sesungguhnya, tidaklah berbeda dengan apa yang diamanatkan oleh Panglima Besar Soedirman pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Dalam amanat yang diucapkan di hadapan Konferensi Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 12 November 1945, di MT-TKR Yogyakarta, Panglima Besar Soedirman menyebutkan bahwa Indonesia tidaklah dapat dipertahankan oleh tentara saja. Militer perlu sesekali mengadakan kerja sama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara.

Amanat Panglima Besar Soedirman tersebut boleh jadi dikumandangkan berpuluh-puluh tahun lalu, namun faktanya, penerapan sistem kesemestaan tersebut terus menjadi hal yang relevan setelah Indonesia sukses mempertahankan kemerdekaannya, bahkan hingga saat ini.

Pelaksanaan pertahanan nirmiliter ini telah kita temukan dalam berbagai pembahasan di bab-bab sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan program TNI-ABRI Masuk Desa di masa lalu. Pelaksanaan program tersebut menjadi sebuah strategi penangkalan yang berlandaskan Sishankamrata.

Pada perkembangannya, program ini pun dapat berlanjut di era reformasi saat ini, di mana kerja sama sipil-militer dilaksanakan sebagai bentuk pertahanan nirmiliter dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah melalui program TNI Manunggal Masuk Desa.

Program tersebut dapat dikatakan sebagai perwujudan nyata dari Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia yang berlandaskan Sishankamrata. Lewat upaya perwujudan kesejahteraan rakyat, kerja sama sipil-militer ini bermaksud untuk memelihara persatuan-dan kesatuan dalam setiap tahapan pembangunan nasional.

Pelaksanaan kerja sama sipil-militer ini juga dapat menanamkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pembelaan negara.

Hal ini membuktikan bahwa seiring dengan pergantian era dan perubahan zaman, nilai-nilai kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan dari konsep Sishankamrata tentunya relatif bersifat tetap. Namun dalam penerapannya, nilai-nilai tersebut senantiasa disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, serta

ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan peluang yang ditimbulkannya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Di tengah perubahan dan dinamika ini, kerja sama sipil-militer pun turut mengalami perubahan dalam berbagai aspek. Namun, perubahan dari kerja-sama sipil militer Indonesia hanya bisa dilakukan berdasarkan keakuratan dalam mempersepsikan berbagai ancaman yang dihadapi seiring dengan perkembangan zaman. Terlebih lagi, kerja sama sipil-militer di bidang pertahanan negara selalu berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan Bangsa Indonesia.

Kerja sama sipil-militer di Indonesia kontemporer didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menjelaskan bahwa dalam bidang pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, kedudukan TNI berada di bawah Presiden, sementara dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Kemhan.

Pada hakikatnya, pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Oleh karena itu, kerja sama sipil-militer merupakan satu hal yang sangat penting bagi bangsa kita.

Perkembangan pelaksanaan kerja sama sipil-militer di masa kini juga terkait erat dengan makin kompleksnya konsep keamanan nasional dan global. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari ancaman yang kerap mengalami perkembangan dengan munculnya ancaman non-tradisional. Dari mana ancaman non-tradisional ini berasal? Jawabannya adalah: dari mana saja.

Ancaman-ancaman non-tradisional, atau ancaman non-militer adalah jenis ancaman yang bersumber dari segala aspek kehidupan, mulai dari ideologi, sosial budaya, politik, ekonomi, lingkungan hidup dan lainnya, di samping tetap hadirnya ancaman tradisional yang bersifat militeristik.

Maka itulah, konsep pertahanan yang bersifat semesta atau *total defence* menjadi solusi untuk mengatasi ancaman nonmiliter di masa

kini, di mana *total defence* juga mendalami konsep pertahanan nirmiliter.

Pertahanan nirmiliter adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nirmiliter. Dalam konteks pertahanan, pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diharuskan untuk saling menopang dalam suatu sistem (Sjamsuoddin, 2016).

Karena itulah, penerapan Sishankamrata di era ini menuntut keterlibatan rakyat sipil yang lebih nyata. Peranan rakyat sipil ini dilakukan lewat integrasi, kolaborasi, serta pemanfaatan kapabilitas rakyat secara lebih intensif lewat kerja sama dengan militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Fungsi pertahanan nirmiliter yang diwujudkan dalam Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (2) dalam menghadapi ancaman militer.

Tentunya, penyiapan Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung tetap berorientasi pada upaya menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, serta menjaga keselamatan bangsa dari segala ancaman.

Berbicara tentang Komponen Cadangan berarti berbicara soal pelibatan rakyat, termasuk generasi penerus bangsa. Pelibatan rakyat pada Pertahanan dan Keamanan Negara tentunya harus dipersiapkan, dilatih, diperlengkapi dan dipersenjatai dengan baik agar siap dan efektif dalam penerapannya.

Karenanya, kita perlu membangkitkan peran masyarakat sebagai “komponen cadangan”. Namun, hal ini jangan sampai dipahami sebagai upaya untuk ‘memiliterkan’ bangsa yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia mengikuti wajib militer.

Sebaliknya, dalam menghadapi berbagai ancaman di masa kini, negara perlu memaksimalkan kapabilitas sipil dan militer sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu contohnya dapat dilihat dari industri pertahanan, di mana penyediaan logistik tempur kini dilaksanakan oleh industri pertahanan lewat pembangunan alutsista yang tidak hanya melibatkan Kementerian Pertahanan, namun juga Kementerian dan Lembaga lainnya.

Mengingat saat ini kita berada di era globalisasi dengan ancaman yang makin kompleks, penerapan Sishankamrata dalam kerja sama sipil-militer tidak hanya dapat dilakukan untuk perkembangan bangsa, namun juga dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat melanda.

Di era globalisasi, kita telah melalui berbagai jenis ancaman yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang baru saja kita lalui.

Bagi Indonesia, tentunya hanya ada satu sikap yang perlu diambil dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada, tidak lain adalah *collective response to protect the country* atau respon kolektif untuk melindungi negara kita, yaitu lewat kerja sama sipil-militer.

Maka itu, secara konkret, kerja sama sipil-militer dalam penerapan Sishankamrata di era demokrasi dan globalisasi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi militer, kerja sama ini tak hanya dapat dilakukan lewat pelaksanaan Operasi Militer Perang (OMP) untuk melindungi rakyat, namun juga Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta penguatan manajerial terhadap berbagai aspek yang menjadi otoritas sipil.

Dengan menjalankan tugas-tugas OMP maupun tugas OMSP dengan baik, maka keberadaan TNI akan selalu dicintai rakyat, keberadaannya sangat dinantikan dan menyatu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bangsa. Maka ke depan, TNI AD akan memiliki wibawa dan disegani rakyat karena keberadaannya dapat betul-betul memberikan perlindungan dan pengayoman untuk

menjaga bangsa ini berkembang dan maju sesuai kehendak bersama menuju cita-cita bangsa (Sjamsuddin, 2016).

Sementara dari sisi sipil, kerja sama dapat dilaksanakan lewat pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman-ancaman non-tradisional yang bisa datang dari mana saja.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama sipil-militer Indonesia di era globalisasi dan demokrasi juga bisa dilakukan lewat pertukaran informasi dan kapasitas, pemberian bantuan kepada tim kerja dan pelatihan bersama yang lintas sektor antara sipil dan militer, serta penyusunan program bersama.

Pelaksanaan tersebut menjadi sebuah bentuk penerapan Konsep Sishankamrata di era demokrasi. Tanpa meninggalkan keyakinan akan nilai-nilai Sishankamrata yang telah tertanam sejak masa perjuangan kemerdekaan, penerapan konsep Sishankamrata dalam kerja sama sipil-militer Indonesia di masa kini terus diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman serta tuntutan dari perkembangan zaman.

Di saat yang sama, memang tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan kerja sama sipil-militer di Indonesia bukanlah hal yang simpel dikarenakan wilayah Indonesia yang begitu luas, yang terdiri dari laut, udara, dan darat. Maka itulah, diperlukan sistem kerja sama sipil-militer yang terintegrasi dan saling mendukung satu sama lain.

Konsep kerja sama sipil-militer ini sejalan dengan perkembangan demokratisasi yang merupakan bagian dari proses globalisasi. Proses demokratisasi yang berbeda di setiap negara akan berpengaruh terhadap kerja sama sipil-militer, termasuk juga di Indonesia.

Keunggulan dari demokrasi akan tetap menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi di masa kini. Karenanya, kerja sama sipil-militer menjadi sesuatu yang mutlak bagi Indonesia. Namun tentunya ada beberapa ketentuan yang harus dirahasiakan dari sipil, seperti urusan intelejen. Meski begitu, sipil tetap harus dilibatkan dalam mengatur seperti strategi.

Faktanya, tidak ada persoalan di negara ini yang bisa selesai dengan hanya melibatkan satu pihak saja dalam berbagai aspek maupun bidang. Dengan situasi global yang makin kompleks, seluruh pihak perlu dilibatkan dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada. Maka itulah, kerja sama sipil-militer menjadi sesuatu yang diperlukan dan harus dikembangkan di era globalisasi dan demokrasi.

Pada prinsipnya, militer dan sipil perlu sering 'mengobrol'. Layaknya di Amerika Serikat, sipil dan militer 'mengobrol' agar presiden dapat memilih kebijakan yang tepat. Hasil dari obrolan sipil dan militer Indonesia tersebut nantinya dapat dikembangkan menjadi sebuah kebijakan yang dipilih oleh menteri.

Mengelola pertahanan negara sebagai penerapan Sishankamrata di era demokrasi ini tentunya membutuhkan partisipasi publik alias masyarakat luas, sebab seluruh warga negara adalah pemangku kepentingan atas keselamatan negara.

Maka itu, perumusan kebijakan-kebijakan pertahanan tidak lagi boleh didominasi hanya oleh militer. Masyarakat luas, harus menjadi bagian penting dalam diskursus tentang kebijakan pertahanan dan lebih lagi dalam implementasinya.

Sebagai konsekuensi kehidupan bernegara di era demokrasi, militer tidak boleh diberikan semacam 'cek kosong' dalam merumuskan kebijakan pertahanan. Partisipasi publik-masyarakat luas adalah keharusan.

Publik juga harus terus menerus secara konsisten belajar menguasai pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan pertahanan negara. Oleh karena itu, kerja sama sipil-militer harus juga berujung pada usaha pemberdayaan kapasitas publik untuk semakin memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengelolaan pertahanan negara.

Pendirian Universitas Pertahanan misalnya, dapat dilihat sebagai upaya untuk membangun ruang publik bagi tumbuhnya diskursus yang mencerdaskan dalam pengelolaan pertahanan negara. Tentu saja hal didasari atas keyakinan pentingnya kerja sama sipil-militer dimaksud.

Di sini perlu kecermatan kepemimpinan dan manajemen baik dari sisi sipil maupun militer untuk mengelola pengelolaan pertahanan negara di dalam iklim demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi interaksi kerja sama sipil-militer. Hal ini penting mengingat pergerakan demokrasi di Indonesia begitu cepat sehingga memungkinkan fenomena demokrasi memberikan imbas bagi penguatan kekuatan pertahanan negara kita.

Militer sudah membuka pintu yang luas bagi bangsa di era demokrasi ini untuk meneropong perjalanan TNI dari masa ke masa. Bagi TNI hal ini memberikan manfaat ganda bagi kehormatan dan nilai moral yang senantiasa menjadi tanggung jawab generasi TNI untuk lebih percaya bahwa nilai-nilai demokrasi pada gilirannya juga memberikan atmosfer yang baik bagi pembangunan profesionalitasnya.

Sebaliknya, bagi sipil, keterbukaan ini menjadi pintu bagi penguatan karakter sipil yang diperlukan bagi pembangunan nasional, secara khusus bagi penguatan penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penerapan kerja sama sipil-militer yang didasari oleh keyakinan akan Sishankamrata perlu disesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter, lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan menjadi unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa.

Dengan perubahan dinamika ancaman yang membuat penanganan danantisipasi Pemerintah turut berubah, kerja sama sipil-militer yang produktif menjadi sebuah hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari kerja sama sipil-militer yang telah kita laksanakan dalam berbagai bidang di era reformasi dan demokrasi, kita mendapati bahwa kemampuan militer dapat menopang kehidupan masyarakat dan

negara, terutama di bidang manajerial, sehingga kemampuan tersebut dapat membantu sipil di bidang ekonomi, teknologi, dan politik.

Hal ini tidak terlepas dari perubahan ancaman yang menjadi multidimensi, sehingga setiap negara saat ini membutuhkan penanganan secara lintas sektoral. Bagi NKRI, pertahanan negara menjadi syarat mutlak bagi keutuhan negara kita.

Dalam menghadapi ancaman yang makin kompleks dan multidimensi, seperti pandemi yang telah kita lewati, semua itu tidak bisa diselesaikan oleh militer saja. Kerja sama sipil-militer menjadi sebuah kebutuhan yang berkontribusi bagi pertahanan Indonesia.

Dengan berkembangnya demokrasi di Indonesia, maka supremasi sipil terhadap militer pun makin menguat, sehingga di masa kini, kekuatan militer fokus pada aspek pertahanan dan keamanan negara. Di saat yang bersamaan, pemerintah pun wajib menjamin semua kebutuhan militer dalam merencanakan pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan. Tentunya, hal tersebut perlu dirumuskan oleh sipil dan militer secara bersama-sama dan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja.

Kondisi terkini serta masa depan menuntut kita untuk melakukan transformasi dalam mengelola SDM pertahanan negara, termasuk juga dalam hal kerja sama sipil-militer.

Dengan begitu, konsep pertahanan negara akan bersinergi dengan konsep keamanan nasional, di mana semua unsur sipil dan unsur militer yang terkait dalam usaha-usaha pertahanan negara akan mengembangkan sebuah pola atau proses interaksi guna mencapai persepsi yang sama terhadap konsepsi keselamatan bangsa.

Pengelolaan hubungan antarorganisasi di masa depan membutuhkan bentuk baru yang interdependen dalam bentuk *networks* atau jejaring yang dapat membentuk kolaborasi.

Pengembangan model kerja sama sipil militer juga harus direncanakan dan membutuhkan penyesuaian terhadap perkembangan model kerja sama yang memanfaatkan teknologi digital, sehingga metode yang digunakan akan makin canggih dan lebih cepat, dalam rangka mendukung pertahanan nasional yang dapat menjawab

tantangan perubahan zaman, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis.

BAB VI

PENUTUP

Bab 6 Penutup

Lewat lima bab yang berbeda, kita telah melakukan refleksi historis terhadap perjalanan kerja sama sipil-militer Indonesia. Refleksi historis ini dimulai dengan memandang masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yang kemudian dilanjutkan dengan era pasca revolusi, hingga akhirnya kita mencapai masa reformasi yang menjunjung kerja sama sipil-militer dalam iklim demokrasi.

Sejarah sudah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kerja sama sipil-militer Indonesia telah melewati jejak historis yang panjang dan pada perkembangannya tertanam menjadi budaya dalam pelaksanaan kerja sama sipil-militer Indonesia.

Perjalanan kerja sama sipil-militer Indonesia tentunya tidak terlepas dari sejarah bangsa dengan segala perjuangannya. Lewat refleksi sejarah jugalah, kita mengetahui bahwa proses mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil dari kerja sama sipil-militer. Baik TNI maupun rakyat, baik politisi sipil maupun angkatan bersenjata, memberikan kontribusi yang sama penting dan sama besarnya dalam perjuangan ini.

Kita pun mengetahui bahwa sejak awal pendiriannya pada zaman revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan, TNI senantiasa hadir di tengah-tengah rakyat. Bahkan, TNI sendiri sesungguhnya lahir dari rakyat, dengan tujuan yang tak lain untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI.

Mengingat sejarah pembentukan TNI yang terkait erat dengan rakyat, berbagai tantangan yang dihadapi oleh rakyat juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh TNI.

Pada perkembangannya, TNI telah mengatasi berbagai rongrongan terhadap eksistensi yang mengancam kelangsungan hidup NKRI. Rongrongan ini hadir dalam berbagai wujud, mulai dari agresi militer, hingga pemberontakan dalam negeri yang ingin memisahkan diri dari NKRI dengan berbagai latar kepentingan. Di perjalanannya menghadapi semua tantangan tersebut, TNI senantiasa bekerja sama dengan masyarakat sipil dalam berbagai aspek dan bidang.

Salah satu contohnya dapat dilihat kembali pada berbagai peristiwa sejarah, di mana kita mengetahui bahwa kelangsungan hidup Pemerintahan RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 pernah berada pada masa kritis akibat agresi militer Belanda yang berusaha merebut Maguwo dan menyerang Yogyakarta.

Namun, para pejuang dan pahlawan dari pihak sipil dan militer terus meneteskan keringat dan darah untuk meletakkan fondasi Sishankamrata yang mempersatukan rakyat, seperti yang tercantum pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945.

Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, terlihat dengan jelas bahwa kerja sama sipil-militer merupakan satu kesatuan yang bersifat manunggal, di mana selain tentara ada juga badan-badan perjuangan rakyat dan pergerakan rakyat dari berbagai unsur sipil yang secara langsung melibatkan diri pada pertempuran di berbagai daerah, seperti pertempuran Surabaya yang dikenal dengan arek-arek Suroboyo, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api Medan Area, Puputan Margarana, dan lain sebagainya.

Keberadaan serta partisipasi badan-badan perjuangan rakyat dalam revolusi ini sesungguhnya menjadi elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan kerja sama sipil-militer di masa awal kemerdekaan Indonesia.

Lebih lanjut, didapati juga bahwa kerja sama sipil-militer dalam refleksi sejarah bisa dilihat dari dua sisi. Pertama adalah kerja sama yang terlaksana di antara politisi sipil dan pejuang militer. Kedua adalah kerja sama antara TNI dan rakyat.

Meski menjalankan perjuangan lewat dua jalur berbeda, sejarah dengan jelas menunjukkan bahwa pejuang sipil dan militer tidak

pernah berhenti untuk saling membantu. Kedua belah pihak saling melengkapi satu sama lain dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI.

Contoh dari kerja sama ini juga telah kita bahas sebelumnya, di mana para politisi sipil terus berjuang untuk mempertahankan eksistensi TNI meski saat Belanda menuntut untuk membubarkan TNI. Sementara itu, para pejuang militer dengan sigap meneruskan perjuangan mereka meski di tengah kondisi yang kritis, seperti saat para politisi sipil ditawan oleh Belanda. Berkat perjuangan yang kokoh tersebut, kita berhasil menunjukkan bahwa eksistensi Indonesia belumlah berakhir pada saat itu, meski Belanda mengumandangkan hal sebaliknya.

Dari refleksi sejarah kita juga mendapatkan pelajaran berharga melalui kerja sama Soekarno dan Soedirman untuk melawan penjajah dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Dua sosok pemimpin besar dari pihak sipil dan militer ini merupakan cerminan dalam pelaksanaan kerja sama sipil-militer pada masa perjuangan kemerdekaan. Meski dengan segala dinamika yang ada, kedua sosok ini kerap mengemban peran mereka sebagai pemimpin sipil dan pemimpin militer demi mencapai tujuan yang sama, yang tak lain adalah kemerdekaan Indonesia.

Sebagai pemimpin yang berasal dari pihak sipil, Presiden Soekarno kerap kali menunjukkan dukungan dan apresiasinya terhadap eksistensi militer serta perjuangan yang mereka lakukan.

Begitu juga dengan Panglima Besar kita, Jenderal Soedirman. Meski dihadapi oleh masa kritis dan sulit, Jenderal Soedirman tidak pernah berhenti untuk berjuang dan bahkan berhasil mempersatukan prajurit dan rakyat lewat perang gerilya. Situasi sulit ini pada akhirnya mencetuskan konsep Perang Rakyat Semesta, yaitu suatu sistem perlawanan yang melibatkan seluruh rakyat untuk bersama-sama dengan para prajurit membangun kekuatan untuk membela kehormatan dan masa depan bangsa dan negara.

Berkat bantuan dari rakyat, yang menyediakan dukungan seperti informasi, tempat tinggal, hingga lumbung pangan, TNI dapat terus

melanjutkan perjuangannya dalam bergerilya. Tekad yang kuat serta semangat bahu membahu dari sipil dan militer ini pada akhirnya berhasil membentangkan jalan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berkat keberhasilan Jenderal Soedirman dalam mempersatukan militer dan sipil, masa perjuangan ini bahkan mendapat julukan Zaman Gerilya

Pelaksanaan perang gerilya ini pada akhirnya menjadi titik awal sistem pertahanan rakyat semesta serta embrio dari hubungan sipil-militer menjadi kerja sama sipil-militer Indonesia.

Setelah melalui perjuangan yang begitu berat, Bangsa Indonesia sukses mempertahankan kemerdekaannya. Seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai faktor yang mendorong perubahan serta perkembangan kerja sama sipil-militer Indonesia.

Memandang kerja sama sipil-militer dari refleksi sejarah juga membuat kita mengetahui bahwa terjadi pergeseran peran dan pola pada setiap era. Seperti yang sudah dibahas dalam bab 4, berbagai perwujudan kerja sama sipil-militer beserta perkembangannya dapat terus kita lihat di masa yang berbeda.

Perkembangan kerja sama sipil-militer Indonesia kemudian meluas ke berbagai bidang, mulai dari bidang yang terkait erat dengan militer seperti aksi penumpasan pemberontakan DI/TII di masa lalu, serta industri pertahanan di masa sekarang. Kerja sama ini pun meluas ke bidang-bidang yang umumnya lebih banyak melibatkan peranan sipil, seperti bidang sosial dan bidang olahraga.

Jalan tengah yang digagaskan oleh A.H Nasution misalnya, mengizinkan, TNI untuk memberikan perbantuan bagi berbagai kegiatan masyarakat di luar militer, seperti termasuk dalam kegiatan sosial budaya hingga politik di masa lalu.

Ketika terjadi pergantian era, kerja sama sipil-militer Indonesia pun kembali mengalami perubahan, tepatnya pada era reformasi. Dengan adanya paradigma baru TNI, militer di era reformasi senantiasa berupaya untuk mengembangkan para prajuritnya dalam rangka melaksanakan kerja sama sipil-militer yang lebih baik.

Dalam satu dekade reformasi yang sudah berjalan sekarang ini, TNI merespons reformasi dengan memosisikan diri sebagaimana alat negara di bidang pertahanan negara yang tunduk kepada otoritas sipil yang berdaulat. Paradigma baru yang dipergunakan TNI dalam melakukan reformasi adalah dengan melakukan perubahan yang rasional dan sistematis. TNI juga melakukan koreksi perbaikan, menghilangkan hal-hal buruk yang merusak citra, dan melakukan terobosan terukur yang produktif.

Berkat paradigma baru TNI jugalah, kerja sama sipil-militer dapat terus berjalan dan berkembang di masa kini. Di era reformasi saat ini, kerja sama sipil-militer dalam pertahanan negara diatur dalam berbagai regulasi dan disesuaikan dengan bentuk ancaman yang dihadapi, di mana dalam menghadapi ancaman militer, TNI ditempatkan sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Dengan adanya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur dua tugas pokok TNI, yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer selain Perang (OMSP), peranan sipil dalam kerja sama sipil-militer pun juga mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Salah satu contoh yang signifikan adalah peranan sipil dalam kerja sama sipil-militer untuk industri pertahanan di era reformasi, lewat terbukanya kerja sama dalam pengembangan industri pertahanan bersama berbagai perusahaan-perusahaan BUMN yang menghadirkan dukungan bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri dalam rangka mendorong kemandirian industri pertahanan.

Kita pun juga mengetahui bahwa situasi dan dinamika dalam negeri bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong berbagai perkembangan yang dialami kerja sama sipil-militer Indonesia. Dinamika global ternyata juga berpengaruh terhadap perkembangannya, dan hal ini juga telah kita bahas lewat bab 4.

Di tengah perubahan yang terus terjadi, kerja sama sipil-militer dalam mendorong pengembangan industri pertahanan menjadi hal yang layak untuk disorot. Untuk pengembangan strategis ke depan, kesinambungan kebijakan pada industri pertahanan memerlukan

komitmen dan kepedulian dari berbagai pihak agar jalannya industri pertahanan tidak tersendat-sendat. Bahkan dengan melakukan strategi *driven analysis*, akan diketahui bahwa kebutuhan akan anggaran pertahanan akan jauh lebih tinggi dan itu akan memacu pengembangan industri pertahanan.

Karena perubahan strategis yang begitu cepat bahkan cenderung penuh ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi, adaptasi terhadap kemampuan industri pertahanan harus senantiasa dikembangkan dari berbagai pemikiran, gagasan, serta pertimbangan dari perubahan-perubahan strategis yang terjadi di sekitar Indonesia.

Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh aspek strategi, teknologi, serta persepsi dan kalkulasi hubungan internasional. Kementerian Pertahanan dalam hal ini mendukung setiap kerja keras dan kerja cerdas, serta kreasi dan inovasi pelaku industri pertahanan yang akan mendukung meningkatnya kapabilitas strategis demi terciptanya Indonesia sebagai kekuatan regional seperti yang diharapkan.

Dari pembahasan di atas, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya, perwujudan kerja sama sipil-militer pada era reformasi cenderung reformis dan visioner. Perkembangan kerja sama sipil-militer ke depan merupakan suatu tuntutan perubahan paradigma dari hasil reformasi, di mana militer merupakan bagian dari sistem pemerintahan sebagai alat pertahanan negara yang melaksanakan kerja sama sipil-militer di Indonesia sebagai negara demokrasi.

Sejalan dengan proses demokratisasi, berbagai koordinasi dan perencanaan dalam pertahanan negara dilakukan bersama-sama dengan kementerian/lembaga dalam kegiatan komponen utama, serta diatur mekanisme dalam perundang-undangan yang terdapat sebuah sistem kekuatan sipil didesain untuk mendukung kekuatan militer.

Maka itu, peran militer di masa damai dan darurat bersifat "*Ultima Ratio*", yang bukan penentu akhir, melainkan elemen utama untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara pada kondisi kritis dan krisis.

Saat ini, dengan perubahan dinamika ancaman yang membuat penanganan dan antisipasi pemerintah juga ikut berubah mengikuti

dari jenis ancaman yang ada, kerja sama sipil-militer yang produktif menjadi sebuah hal penting dalam kehidupan bangsa dan suatu negara.

Kerja sama sipil-militer yang terjadi di Indonesia telah melewati jejak historis yang panjang dan telah menjadi budaya dalam pelaksanaan kerja sama sipil militer di Indonesia. Kemampuan militer dapat menopang kehidupan masyarakat dan negara terutama di bidang manajerial, dan dengan kemampuan tersebut, militer dapat membantu sipil di berbagai bidang, dari bidang ekonomi, teknologi hingga sosial.

Perubahan dari kerja-sama sipil militer Indonesia merupakan suatu hal yang memang harus dilakukan dikarenakan berbagai ancaman baru yang bisa datang kapan saja seiring dengan perkembangan zaman.

Poin lain yang tak kalah penting, kita perlu senantiasa mengingat bahwa meski di tengah arus globalisasi dengan segala dinamikanya, konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) akan terus menjadi pedoman dalam membangun usaha pertahanan negara, di mana di dalamnya juga termasuk kerja sama sipil-militer.

Seiring bergantinya zaman dan era, konsep Sishankamrata tetap menjadi keyakinan dasar bagi Bangsa Indonesia, yang penerapannya turut tercermin dalam pelaksanaan kerja sama sipil-militer Indonesia.

Konsep Sishankamrata tidak pernah dan tidak akan tergerus oleh waktu. Baik dalam menghadapi ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional yang kompleks dan multidimensional, keyakinan akan

Sishankamrata yang terlahir dari sejarah panjang dan perjuangan bangsa di masa lalu akan selalu tertanam di tubuh Bangsa Indonesia.

Maka itu, peran sipil dalam kerja sama sipil-militer merupakan sebuah hal yang signifikan dalam penerapan Sishankamrata. Melalui kerja sama dengan militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), kapabilitas rakyat sipil dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pelaksanaan Sishankamrata.

Pada akhirnya, kita sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada persoalan di Indonesia yang dapat diselesaikan dengan hanya melibatkan satu aspek, bidang, ataupun aktor saja. Hal itu menjadi sebuah pembelajaran yang sudah kita lihat di masa lalu, di mana

peranan sipil maupun militer memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka itulah, perjuangan terus dilanjutkan tanpa melupakan nilai-nilai kerja sama sipil-militer sebagai penerapan konsep Sishankamrata.

Era globalisasi ini pun tak berbeda. Bersamaan dengan situasi global yang makin kompleks dari hari ke hari, seluruh aspek, bidang, serta aktor perlu bersiap dan terlibat dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada. Dalam rangka menangkal berbagai ancaman yang ada, kekuatan TNI yang didukung oleh kekuatan rakyat akan membentuk kemampuan bela negara yang dapat diandalkan. Dengan bersatunya kekuatan TNI dan rakyat, maka berbagai ancaman yang dapat menggoyahkan eksistensi negara, baik dari luar maupun dalam dapat dihadapi bersama. Dengan berlandaskan konsep Sishankamrata, seluruh aspek tersebut dapat terwujud lewat kerja sama sipil-militer.

Dalam kehidupan bernegara, kerja sama sipil-militer menjadi sebuah kekuatan yang menopang berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan dinamika dan perubahan di lingkungan global, kerja sama sipil dan militer sudah menjadi suatu hal yang mendunia untuk menyelesaikan nyaris semua permasalahan, kelangsungan hidup kemanusiaan dan kenegaraan, bahkan menjadi sebuah strategi dan solusi di era demokrasi. Dengan demikian, kerja sama sipil-militer menjadi keharusan untuk memperkuat demokrasi itu sendiri.

Penerapan kerja sama sipil-militer Indonesia memang sudah seharusnya sejalan dengan perkembangan demokratisasi yang merupakan bagian dari proses globalisasi. Di saat yang bersamaan, hal ini juga menimbulkan sebuah pertanyaan; apakah negara-negara lain melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Indonesia lewat pelaksanaan kerja sama sipil-militernya?

Tidak dapat dipungkiri, setiap negara pastinya mengalami perubahan situasi dan dinamika serta dihadapi dengan tantangan yang berbeda-beda dalam melaksanakan usaha pertahanannya. Maka itulah, model pertahanan serta penerapan kerja sama sipil-militer tidak hanya didasari oleh satu ide, pemikiran akademis, teori, dan konsep saja. Ada

begitu banyak pemikiran serta keyakinan yang dapat menjadi pedoman penerapan Kerja Sama Sipil-Militer setiap negara.

Seperti apa pemikiran akademis dan teori yang sesuai dengan pelaksanaan Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia, serta bagaimana negara-negara lain menerapkan kerja sama sipil-militernya akan menjadi pembahasan kita di volume kedua dari buku ini, yaitu 'Menatap Masa Depan Kerja Sama Sipil-Militer Indonesia Volume II: Teori dan Praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Baha Uddin, Harnoko *et. al.* (2020). *Masyarakat Pedesaan dan Revolusi Kemerdekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta:: Dinas Kebudayaan DI Yogyakarta.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (2004). *Sejarah Diplomasia Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa: Buku I Periode 1945-1950*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sejarah ABRI. (1983). *Badan-Badan Perjuangan*. Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sejarah ABRI.
- Dephankam. (1983.). *Rencana Umum "Manunggal" TNI-ABRI Masuk Desa 1983-1984*. Jakarta: Dephankam.
- Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (2010). *Tertangkapnya Gembong G 30 S/PKI D.N. Aidit dalam Mewaspadaai Pengkhianatan Partai Komunis di Indonesia (Kumpulan Artikel Pemberontakan PKI dan Operasi Penumpasannya)* (pp. 77-87). Bandung: Dinas Sejarah Angkatan Darat.
- Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (1979). *Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Peranan TNI-AD dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Bandung: Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (1982). *Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Sejarah Perkembangan Organisasi TNI-AD.* . Bandung: Dinas Sejarah Militer tentara nasional Indonesia Angkatan Darat.

- Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (1985). *Sudirman: Prajurit TNI Teladan*. Bandung: Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Disjarahdam VI/Siliwangi. (1979). *Siliwangi dari Masa ke Masa: Edisi ke-2*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Kartasasmita, G. *et al.*, (1995). *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kivlan Zen. (2021). *Refleksi internal TNI AD 1945-2021*. Jakarta: LMPMI.
- Martowidjojo, H. M. (1999). *Kesaksian tentang Bung Karno: 1945-1967*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Notosoetardjo, H. A. (1962). *Kepribadian Revolusi Bangsa Indonesia Berdasarkan 5 Amanat Bung Karno*. Penerbitan Bersama Endang, Pemuda, Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesia.
- Notosusanto, N. (1970). *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces, Especially Since 1966*. Jakarta: Pusat sejarah ABRI.
- Notosusanto, N. (1968). *Pertempuran Surabaya*. Jakarta: Lembaga Sedjarah Hankam.
- Poesponegoro, M. D, & Notosusanto, N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI*. Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka.
- Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. (1976). *30 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*. (S. S. Handojo, Ed.) Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. (1985). *40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: Masa Perang Kemerdekaan, Konsolidasi Awal, dan Masa Integrasi (1945-1965)*. Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Pusat Sejarah TNI. (2004). *Soedirman & Sudirman*. Jakarta: Pusat Sejarah TNI.
- Pusat Sejarah TNI. (2010). Peristiwa Kanigoro (13 Januari 1965) dalam *Mewaspadai Pengkhianatan Partai Komunis di Indonesia:*

(Kumpulan Artikel Pemberontakan PKI dan Operasi Penumpasannya) (pp. 51-52). Bandung: Dinas Sejarah Angkatan Darat.

- Reid, A. (1974). *The Indonesian National Revolution 1945-1950*. Victoria: Longman.
- Saleh, R. (1987). *Dari Jakarta kembali ke Jakarta*. Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah Jakarta.
- Santoso, J *et al.*, (2014). *Sejarah Reformasi TNI*. Jakarta: Pusat Sejarah TNI.
- Sjamsoeddin, S. (2016). *Komitmen dan Perubahan: Suatu Persepsi dan Perspektif*. Selemba Empat
- Soetanto, H. (2006). *Yogyakarta: Jenderal Spoor (Operatie Kraai) versus Jenderal Soedirman (Perintah Siasat No. 1)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sundari, S. (2017). *Kerja Sama Sipil Militer dalam Mendukung Pertahanan Negara*. Jakarta: Terakata.
- Suryokusumo, S. (2016). *Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter: Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tashadi, Hamoko *et al.*, (1992). *Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1945 -1949*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Tim Penyusun Buku Hubungan-Sipil Militer. (1999). *Hubungan Sipil-Militer Peran, Kontribusi, dan Tanggung Jawab Sipil-Militer dalam Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Tjokropranolo, & Arifin, M. (1992). *Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman: Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia: Kisah Seorang Pengawal*. Jakarta: Surya Presindo.
- TNI. (1999) *Paradigma Baru Peran TNI (Sebuah Upaya Sosialisasi)*. Jakarta.

Peraturan Perundangan-undangan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pencabutan Undang-Undang NO. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara NO. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya
UU RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
UU RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

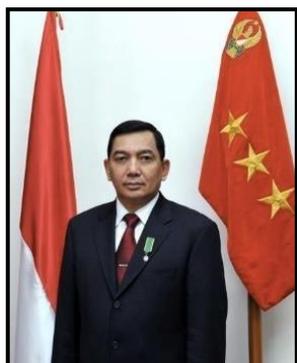
Dokumen Digital:

TNI Angkatan Darat. *OPTIMALISASI KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA.*

Majalah:

Tim Redaksi Majalah WIRA (2015, November-Desember). Memahami Bela Negara. *Majalah WIRA, Volume 57 (No.41), 7.*

RIWAYAT PENULIS



Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, Karir militernya diawali di Komando Pasukan Khusus sebagai Komandan Peleton pada tahun 1975, Komandan Kompi, Komandan Batalyon, Wakil Asisten Operasi Komando Pasukan Khusus. Komandan Group-A Paspampres, Komandan Korem 061/SK Bogor, Kepala Staf Garnizun-1 Jakarta, Kasdam Jaya, Pangdam Jaya, Asisten Teritorial Kasum ABRI, Koordinator Staf Ahli Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan TNI, Sekjen Kemhan, dan Wakil Menteri Pertahanan pada tahun 2010 – 2014. Menyandang pangkat aktif militer sebagai Letnan Jenderal sampai tahun 2011.

Bertugas sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam kegiatan Kerjasama Internasional di bidang pertahanan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) tahun 2012 – 2014, Wakil Ketua Pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee 2018, Saat ini bertugas sebagai Asisten Khusus Bidang Manajemen Pertahanan Negara Menteri Pertahanan RI.

Setelah menyelesaikan Akademi Militer 1974, melanjutkan Pendidikan Dasar Perwira Infanteri, Infantry Officer Advance Course di AS, Seskoad dan Lemhannas. Menyelesaikan berbagai kursus spesialisasi militer: Para Komando, Jump Master, Airborne & Path Finder, Free Fall, Intelijen Strategis, Terrorism in Low Intensity Conflict di AS. Menyelesaikan program Master di bidang Bisnis – Administrasi 1994 dan Business School in National University of Singapore pada 2015. NATO School Oberammergau, Jerman pada 2015-2019, National Development Course, National Defence University, Taiwan, 2016. NATO Defence College, Roma, Italy 2018 dan saat ini Mahasiswa S-3 UNHAN RI.

Dianugerahi, 22 Bintang Jasa dan Tanda Kehormatan, termasuk Bintang Dharma dan Bintang Mahaputera Utama. Pada tahun 2014, sebagai Pejabat Tinggi Indonesia Pertama yang menerima anugerah Medali Penghargaan dari The Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC). Beliau dilahirkan di Makassar tanggal 30 Oktober 1952. Tinggal di Jakarta, menikah dan dikaruniai satu orang putra dan satu orang putri.***

RIWAYAT EDITOR



Dr. Ir. Sovian Aritonang, S.Si., M.Si. Saat ini editor menjabat sebagai Kaprodi Keamanan Nasional Pascasarjana Program Doktoral Ilmu Pertahanan Unhan RI. Sebelumnya beliau menjabat sebagai dosen Ketahanan Energi, Kaprodi Industri Pertahanan, Kaprodi Teknologi Daya Gerak, Kaprodi Teknologi Persenjataan di Fakultas Teknologi Pertahanan.

Untuk jabatan kemiliteran saat ini sebagai Perwira Menengah dengan Pangkat Kolonel Kesehatan Matra Udara. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan Fisika Murni dari USU (1993) dengan mendapatkan penghargaan sebagai “Mahasiswa Teladan” pada Tahun 1993, lulus Magister Sains (M.Si) Fisika Bio Material dari Universitas Indonesia (2005), serta Doctor (Dr) Rekayasa Bio Material dari Universitas Indonesia (UI) (2010).

Selain pendidikan umum, Pendidikan kemiliteran yang pernah ditempuh yaitu: Kursus alat Human Centrifuge (HC) di Late Coere Prancis th 2000, Kursus Physiological Training Officer di Lakespra Saryanto, SEKKAU Angkatan 80, SESKOAU Angkatan 48 di Lembang Bandung, Jawa Barat. Dinas Luar Negeri yang sudah beliau tempuh diantaranya adalah: Prancis, Malaysia, Brunai, Singapura, Thailand, Cambodia, India, Korea Selatan, USA, dan Swiss.

Dalam menjalankan Tri Dharma sebagai dosen, editor sampai saat ini telah menerbitkan lebih 60 buku ber-ISBN dari 40 judul buku ber-ISBN sebagai penulis pertama maupun kolaborasi, 40 Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah, serta 4 hasil karya industri ilmiah yang sudah dipatenkan (sebagai inventor 1). Sudah banyak menerbitkan artikel-artikel pada jurnal internasional dan nasional yang terindeks Scopus dan Sinta. Beliau pun sering menjadi pembicara seminar/workshop, orasi ilmiah, maupun mengikuti Prosiding dan Konfrensi Internasioanal dan Nasional.

Atas kontribusinya dalam publikasi ilmiah, saat ini beliau berada pada ranking 5 besar Sinta Dikti kategori afiliasi Unhan RI. Serta berhasil meraih penghargaan sebagai the Best Contribution of Education dari Asia-Africa Excellence Award 2022, yang diselenggarakan oleh D.Y Patil University, Pune-India.

RIWAYAT EDITOR



Dr. Herlina J.R. Saragih, M.Si, CIQnR., CIQaR, lahir di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 28 Juni 1965. Meraih gelar master pada tahun 1997, dan mendapatkan gelar Doktor pada tahun 2011. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI Kementerian Pertahanan.

Penghargaan yang pernah diperoleh di antaranya: Mahasiswa Teladan Nasional 1987, Dosen Teladan Tahun 2015, Penghargaan Dosen Terbaik Universitas Pertahanan Tahun 2018, Penghargaan/Tanda Jasa Berupa

Satyalancana Karya Satya XX Dari Presiden RI Tahun 2017, dan Humanitarian Excellence Award 2022.

Beliau pun aktif dalam beberapa organisasi. Aktif sebagai Pembicara di berbagai kegiatan seminar, juga rutin mengikuti kegiatan ilmiah baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik berupa kegiatan konferensi maupun penelitian. Kegiatan konferensi internasional yang pernah di ikuti diantaranya menjadi presenter pada acara “The 14th ADRI 2017 International Conference and Call for Papers”. “The 2018 Annual Conference of Asian Association for Public Administration (AAPA)” dan “47th International Scientific Conference Economic and Social Development 2019”.

Dalam menjalankan Tri Dharma sebagai dosen, editor sampai saat ini telah menerbitkan lebih dari 10 judul buku ber-ISBN sebagai penulis pertama maupun kolaborasi, Menerbitkan 40 artikel-artikel pada jurnal internasional dan nasional yang terindeks Scopus, Copernicus, dan jurnal nasional Sinta.

